

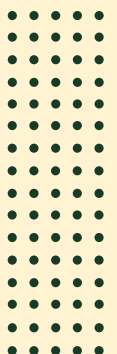


**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
BADUNG**

**2024**

# LKJIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mangupura, 26 Maret 2023  
Inspektur Kabupaten Badung



**Luh Suryaniti, S.Sos. M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690323 198903 2 012

# KATA PENGANTAR

*Om Swastyastu,*



**A**tas Asung Kerta Wara Nugraha dari Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja (LKjIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun kedua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Semesta Berencana 2021-2026. Sesuai Visi RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 yaitu **“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”** akan diwujudkan dengan 11 tujuan yang terdiri dari 19 sasaran strategis dan diukur dengan 22 indikator kinerja utama (IKU). Laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung tahun 2023 berisikan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat serta kepada masyarakat sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan efektivitas program/kegiatan (*refocusing program*) dengan mengutamakan program prioritas sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun

2021-2026 untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui perubahan *mindset* dan penyelarasan program/kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Badung mulai dirasakan manfaatnya hal ini tampak dari perubahan *mindset* dan disiplin ASN sebagai tuntutan dari budaya kinerja yang lambat laun mulai tumbuh dan akan terus kami dorong serta *efisiensi* anggaran sebagai akibat adanya penyelarasan program/kegiatan dengan sasaran RPJMD.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja khususnya kepada jajaran Kementerian PAN dan RB atas perhatian dan pembinaannya selama ini, untuk selanjutnya dengan komitmen dan kerja keras, kami bertekad untuk bisa lebih baik untuk mewujudkan implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Badung.

Sekian dan Terima kasih

*Om Santih, Santih, Santih, Om*

Mangupura, 7 Maret 2024

**Bupati Badung,**



**I NYOMAN GIRI PRASTA**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**emerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

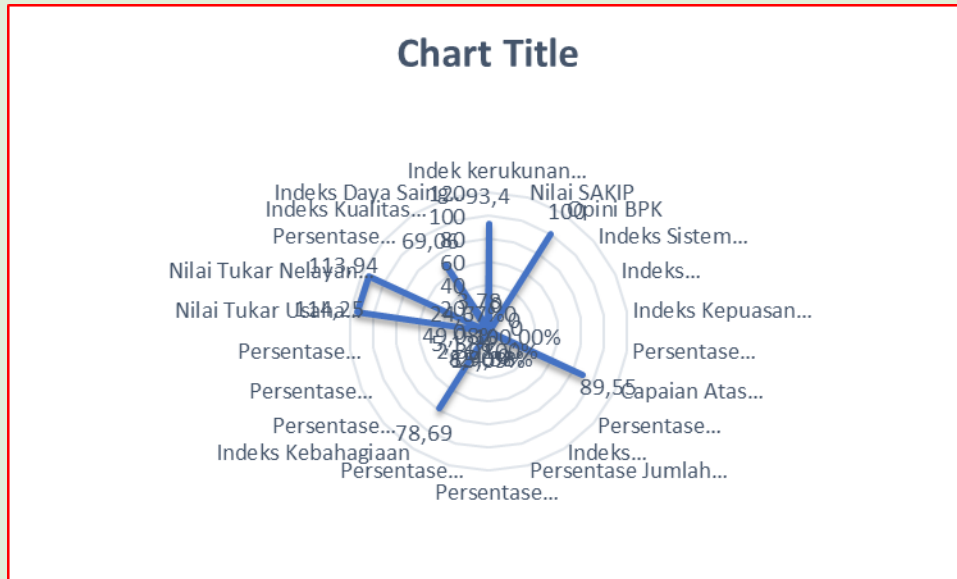
RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 dengan visi ***“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”*** terdiri dari 9 (sembilan) misi, 11 (sebelas) Tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (IKU).

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan, 19 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja utama (IKU). Pengukuran kinerja pada tahun 2023 dilakukan terhadap capaian sasaran strategis RPJMD. Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2023 dari 22 indikator kinerja utama yaitu sebesar 2,434 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111. Terdapat satu indikator dengan nilai minus diatas 100% yaitu persentase penduduk miskin sebesar -118%. Hasil pengukuran indikator sasaran sebanyak 22 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :

- a. Melebihi target (>100%) sebanyak 17 indikator kinerja utama
- b. Dibawah target (<100%) sebanyak 5 indikator kinerja utama



Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) terhadap 22 indikator menunjukkan indikator dengan capaian dibawah target yaitu sebanyak 5 indikator dan 17 indikator telah mencapai target atau diatas target ( $\geq 100\%$ ). Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2021-2026 untuk tahun 2023 seperti berikut :



Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2023 sebesar Rp.6.583.329.971.972,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.961.656.893.759 sehingga persentase penyerapan sebesar 75%.

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis seperti berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SAT UAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	82 (Sangat Tinggi)	93,4	114
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,00 (BB)	76,07 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	100
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,2 (Baik)	3,66 (Sangat Baik)	114

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	57,65 (Sangat Rendah)	74,84 (Sedang)	130
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,50 (Baik)	89,52 (Sangat Baik)	105
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	89,55	119
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	71%	100%	141
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,61 (Sangat Tinggi)	83,08 (Sangat Tinggi)	102
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	7,00%	24,38%	348
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	20,00%	15,09%	75
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,54%	8,9%	93
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	76,64	78,69	103
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,95%	2,30%	-118

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	5,12%	5,12%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,67%	49,08%	155
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	94,73 (Defisit)	114,25	121
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,40	113,94	113
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	25,00%	24,67%	99
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,64 (Sedang)	69,06	112
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7582 (Tinggi)	3,7800	101
<b>Total Kinerja</b>							<b>2,434</b>
<b>Rata-rata Kinerja</b>							<b>111</b>



Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja yang < 100%, sehingga tidak menjadi hambatan dalam implementasi RPJMD semesta berencana 2021-2026 antara lain:

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator nilai SAKIP melalui:
  - a. Revisi pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP
  - b. Melaksanakan pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah/pejabat yang membidangi SAKIP
  - c. Pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja masing-masing perangkat daerah
  - d. Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Badung dengan baik untuk implementasi SAKIP dan pemberian Reward dan punishment bagi perangkat daerah.
  - e. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas Hasil Evaluasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB Bersama Tim SAKIP Kabupaten Badung, agar apa yang menjadi kekurangan dalam indikator nilai SAKIP data dioptimalkan ditahun berikutnya.
2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya jumlah wirausaha melalui:
  - a. Program kemitraan dengan perusahaan besar/toko modern untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk UMKM
  - b. Program Pameran Badung UMKM Week adalah bentuk dukungan pemerintah melalui pameran yang dilaksanakan di Mall /Pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk UMKM agar dikenal lebih luas baik ditingkat domestik maupun mancanegara
  - c. Sosialisasi Kemudahan perizinan usaha mikro, Program Pendampingan kepada UMKM dengan melibatkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk meningkatkan dan pengembangan UMKM
  - d. Melakukan konsolidasi internal dan koordinasi di Bidang pengembangan UMKM dengan para praktisi Koperasi seperti Dekopinda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yaitu Pihak Dinas juga melakukan verifikasi biaya perkiraan revitalisasi pasar yang diajukan oleh pihak desa sehingga diperoleh angka yang lebih realistis, tujuannya adalah efisiensi penggunaan anggaran sebaik mungkin.
4. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
  - a. Memperluas akses kesejahteraan sosial
  - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial
  - d. Memberikan Bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai social safety net sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.
5. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB melalui :
  - a. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung
  - b. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
  - c. meningkatkan Pendapatan dari retribusi obyek wisata dan meningkatkan kualitas Industri Pariwisata



<b>Lampiran II</b>	<b>: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023</b>	<b>159</b>
<b>Lampiran III</b>	<b>: Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023</b>	<b>161</b>
<b>Lampiran IV</b>	<b>Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2023</b>	<b>164</b>
<b>Lampiran V</b>	<b>: Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintahkabupaten Badung Tahun 2021-2026</b>	<b>167</b>

# DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>	
<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar dan Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023	4
<b>Tabel 1.2</b>	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	4
<b>Tabel 1.3</b>	Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Badung Tahun 2023	5
<b>Tabel 1.4</b>	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2023	6
<b>Tabel 1.5</b>	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung tahun 2023	7
<b>Tabel 1.6</b>	Distribusi Penduduk Miskin Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	9
<b>Tabel 1.7</b>	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keperahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016-2023	10
<b>Tabel 1.8</b>	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021- 2023	11
<b>Tabel 1.9</b>	Rencana Aksi RB Tematik Kabupaten Badung Tahun 2023	11
<b>Tabel 1.10</b>	Jumlah, Tipe dan Jumlah StrukturalDi Kabupaten Badung Tahun 2023	28
<b>Tabel 1.11</b>	Distibusi Aparatur Sipil Negara	31
<b>Tabel 1.12</b>	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2023	32
<b>Tabel 1.13</b>	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2023	33
<b>Tabel 1.14</b>	Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2023	34
<b>Tabel 2.1</b>	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026	51
<b>Tabel 2.2</b>	Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023	57
<b>Tabel 2.3</b>	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023	60
<b>Tabel 3.1</b>	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023	63

<b>Tabel 3.2</b>	Data Efisiensi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2023	74
<b>Tabel 3.3</b>	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	87
<b>Tabel 3.4</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2023	91
<b>Tabel 3.5</b>	Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2023	97
<b>Tabel 3.6</b>	Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2023	103
<b>Tabel 3.7</b>	Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang di Kabupaten Badung Tahun 2022	104
<b>Tabel 3.8</b>	Koperasi Sehat Per-Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023	111
<b>Tabel 3.9</b>	Jumlah UMKM maju di Kabupaten Badung Tahun 2023	115
<b>Tabel 3.10</b>	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021-2023	133
<b>Tabel 3.11</b>	Jumlah usaha sarana pariwisata per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2023	133
<b>Tabel 3.13</b>	Sasaran Strategis, Jumlah Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2023	144
<b>Tabel 3.14</b>	Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program di Kabupaten Badung Tahun 2022	147
<b>Tabel 3.15</b>	Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2023	150



# DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>	
<b>Grafik 1.1</b>	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023	8
<b>Grafik 1.2</b>	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Badung tahun 2020-2023	23
<b>Grafik 1.3</b>	Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Badung tahun 2020-2023	24
<b>Grafik 1.4</b>	Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	25
<b>Grafik 1.5</b>	Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 2023	25
<b>Grafik 1.6</b>	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2020-2023	26
<b>Grafik 2.1</b>	Cascading dan Cross Cutting RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026	53
<b>Grafik 3.1</b>	Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung tahun 2018-2019	67
<b>Grafik 3.2</b>	Target dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	71
<b>Grafik 3.3</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	72
<b>Grafik 3.4</b>	Bobot Pada Setiap Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	72
<b>Grafik 3.5</b>	Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2021-2023	77
<b>Grafik 3.6</b>	Nilai Asset Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	78
<b>Grafik 3.7</b>	Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2021-2023	81
<b>Grafik 3.8</b>	Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	82
<b>Grafik 3.9</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2023	85
<b>Grafik 3.10</b>	Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023	88
<b>Grafik 3.11</b>	Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	89

<b>Grafik 3.12</b>	Target dan Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023	96
<b>Grafik 3.13</b>	Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	100
<b>Grafik 3.14</b>	Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya Tahun 2022-2023	103
<b>Grafik 3.15</b>	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2021-2023	107
<b>Grafik 3.16</b>	Target dan capaian indikator persentase koperasi sehat tahun 2022-2023	111
<b>Grafik 3.17</b>	Target dan Capaian Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	115
<b>Grafik 3.18</b>	Target dan capaian meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022-2023	118
<b>Grafik 3.19</b>	Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	120
<b>Grafik 3.20</b>	Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	122
<b>Grafik 3.21</b>	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023	122
<b>Grafik 3.22</b>	Capaian indikator Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2022-2023	125
<b>Grafik 3.23</b>	Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2022-2023	127
<b>Grafik 3.24</b>	Capaian Indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Tahun 2022-2023	129
<b>Grafik 3.25</b>	Capaian Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2022-2023	131
<b>Grafik 3.26</b>	Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung Tahun 2022-2023	136
<b>Grafik 3.27</b>	Perbandingan IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023	137
<b>Grafik 3.28</b>	Target dan Capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2023	141
<b>Grafik 3.29</b>	Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023	142

# DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
<b>Gambar 1.1</b>	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung 28
<b>Gambar 3.1</b>	Penghargaan Opini WTP Tahun 2023 78
<b>Gambar 3.2</b>	Rumus Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN 84
<b>Gambar 3.3</b>	Kategori Tingkat IP ASN 84
<b>Gambar 3.4</b>	Penghargaan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik 90
<b>Gambar 3.5</b>	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 90
<b>Gambar 3.6</b>	Finalis TOP Inovasi 99 dan TOP Inovasi 15 90
<b>Gambar 3.7</b>	Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman Tahun 2023 93
<b>Gambar 3.8</b>	Parameter Penilaian Capaian atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung 100
<b>Gambar 3.9</b>	Monitoring dan Evaluasi Koperasi oleh Tim Penilai Koperasi Sehat Kabupaten Badung Tahun 2023 112



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



Pencapaian kinerja disajikan dengan informasi ketercapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 kepada Presiden sesuai peraturan yang terbaru.

Dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2023, berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;



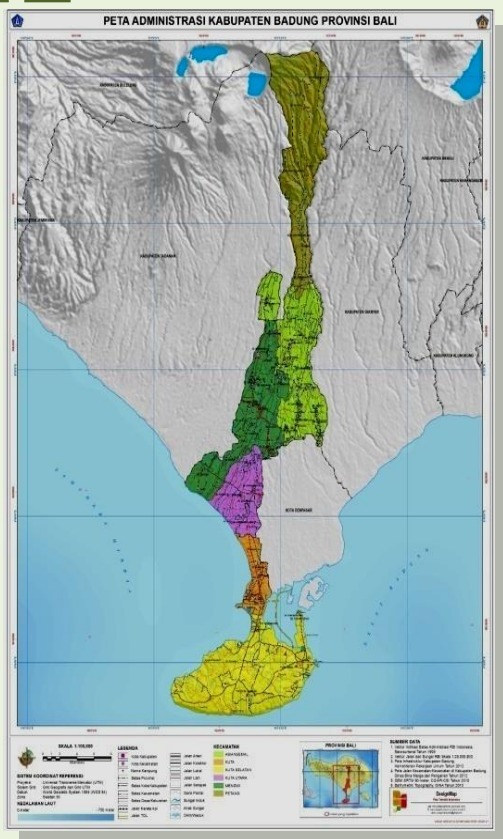


12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

## 1.2. Gambaran Umum

### 1.2.1 Gambaran Geografis

**K**abupaten Badung merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak dibagian tengah dan selatan dari pulau Bali.



Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara  $8^{\circ}14'20''$  -  $8^{\circ}50'52''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ}05'03''$  dan  $115^{\circ}26'51''$  Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan terdiri dari 46 Desa dan 16 Kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 Km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km<sup>2</sup>.





Disamping memiliki desa/kelurahan, terdapat 122 desa adat, 531 Banjar adat dan Sekaa Teruna yaitu kelompok pemuda/pemudi (sekaa) yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi pemerintahan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

Tabel 1.1  
Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas, dan Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Banjar Dinas	Jumlah Lingkungan
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	3	3	51	36
2.	Kuta	Kuta	0	5	0	26
3.	Kuta Utara	Kerobokan	3	3	67	46
4.	Mengwi	Mengwi	15	5	253	57
5.	Abiansemal	Blakiuh	18	0	269	0
6.	Petang	Petang	7	0	107	0
<b>TOTAL</b>			<b>46</b>	<b>16</b>	<b>747</b>	<b>165</b>

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 km<sup>2</sup> atau sekitar 7,43 persen luas wilayah Provinsi Bali, dengan wilayah terluas Kecamatan Petang sebesar 115 km<sup>2</sup> atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan Kuta dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 17,52 km<sup>2</sup> atau 4,16 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung menurut kecamatan seperti pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	101.13	24.16
2.	Kuta	17.52	4.16
3.	Kuta Utara	33.86	8.09



No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
4.	Mengwi	82	19.59
5.	Abiansemal	69.01	16.49
6.	Petang	115	27.48
<b>TOTAL</b>		<b>418.52</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

Kabupaten Badung mengalami 2 musim yaitu ; musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya uap air yang dikandungnya. Curah Hujan dengan kondisi normal sampai cukup tinggi. Curah hujan yang paling tinggi pada bulan Februari sebesar 488,5 mm dan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober dikarenakan pada bulan tersebut sama sekali tidak terjadi hujan. Sedangkan untuk hari hujan paling tinggi pada bulan Januari dan Februari sebanyak 26 hari dan terendah bulan Oktober. Sedangkan untuk rata-rata penyinaran matahari yang paling banyak pada bulan Desember sebesar 10,52%, sedangkan terendah pada bulan April sebesar 4,59%. Kondisi iklim di Kabupaten Badung berdasarkan data curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran seperti tabel berikut :

Tabel 1.3

Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Mataharai di Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
1	Januari	306,30	26,00	6,95
2	Februari	488,5	26,00	4,56
3	Maret	63,40	11,00	6,84
4	April	145,80	20,00	4,59
5	Mei	23,10	7,00	8,36
6	Juni	38,60	6,00	7,19
7	Juli	182,20	13,00	9,14
8	Agustus	41,50	3,00	9,44
9	September	2,00	1,00	7,33
10	Oktober	...	...	9,46
11	November	61,70	11,00	9,70
12	Desember	209,30	12,00	10,52

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024



### 1.2.2 Gambaran Demografi

**P**enduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2023 sebanyak 530.226 jiwa, yang terdiri dari 263.982 jiwa penduduk laki-laki dan 266.244 jiwa penduduk perempuan . Distribusi Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 132.380 jiwa atau 24,97% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 32,971 jiwa (6,22%). Jumlah penduduk menurut Kecamatan seperti tabel berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin  
di Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	KUTA	28.845	28.459	57.304	10,81
2	MENGWI	65.926	66.454	132.380	24,97
3	ABIANSEMAL	49.259	50.108	99.364	18,74
4	PETANG	16.640	16.331	32.971	6,22
5	KUTA SELATAN	59.553	60.261	119.814	22,60
6	KUTA UTARA	43.762	44631	88.393	16,67
<b>BADUNG</b>		<b>263.982</b>	<b>266.244</b>	<b>530.226</b>	<b>100</b>

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung 2023

Pertambahan penduduk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 12.257 orang. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Mengwi dengan persentase 24.97% dari jumlah penduduk di Kabupaten Badung, sedangkan kecamatan Petang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu dengan persentase 6,22% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Badung.

Komposisi penduduk digambarkan Tabel dibawah ini, dimana tingkat kelahiran di Kabupaten Badung masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur muda dibandingkan pada kelompok umur di atasnya.



Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur 20-24, 15-19 dan 25-29 tahun. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur secara lengkap seperti grafik berikut :

Tabel 1.5  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Badung tahun 2023

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PDDK
1	00-04	15.611	14.388	29.999
2	05-09	18.622	17.307	35.929
3	10-14	20.583	19.218	39.801
4	15-19	21.441	20.094	41.535
5	20-24	23.852	22.500	46.352
6	25-29	21.061	20.436	41.497
7	30-34	16.707	17.089	33.796
8	35-39	14.778	16.159	30.937
9	40-44	17.575	20.558	38.133
10	45-49	20.309	22.565	42.874
11	50-54	23.276	23.594	46.870
12	55-59	17.950	16.956	34.906
13	60-64	11.751	11.552	23.303
14	65-69	8.103	8.724	16.827
15	70-74	5.657	6.025	11.682
16	75+	6.706	9.079	15.785
<b>TOTAL</b>		<b>263.982</b>	<b>266.244</b>	<b>530.226</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung 2023

### 1.3. Gambaran Perekonomian

#### 1.3.1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,32% dibandingkan tahun 2022 sehingga menjadi 11,29%. Hal ini membuktikan bahwa pasca pandemi COVID 19 laju pertumbuhan ekonomi semakin membaik karena perekonomian di Kabupaten Badung lebih dominan ditopang oleh sektor pariwisata.

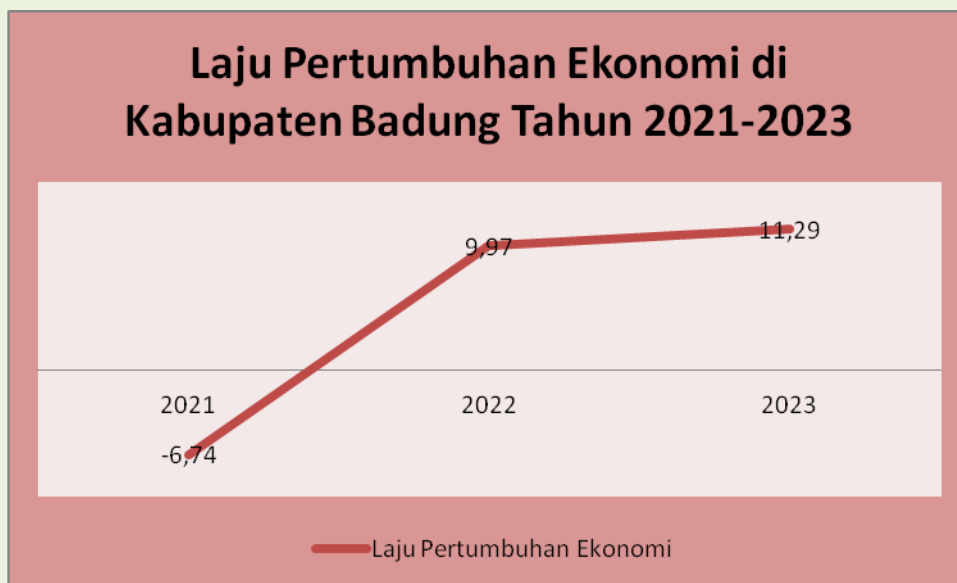




Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023 di seperti grafik berikut :

Grafik 1.1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023



Sumber data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

### 1.3.2. Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah atau lebih rendah dari besaran yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Distribusi penduduk miskin di Kabupaten Badung cenderung mengalami penurunan dan terendah di seluruh Kabupaten di Provinsi Bali. Pada tahun 2022 terdapat 18,28 ribu jiwa penduduk miskin atau 2,53% dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 yakni 17,01 ribu jiwa atau sekitar 2,3%. Secara lengkap Distribusi penduduk miskin di Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 seperti Tabel berikut:



Tabel 1.6

Distribusi Penduduk Miskin Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		2022	2023	2022	2023
1	Kab. Badung	18,28	17,01	2,53	2,3
2	Kab. Tabanan	23,46	21,42	5,18	4,7
3	Kab. Jembrana	15	14,12	5,3	4,96
4	Kab. Gianyar	24,74	23,76	4,7	4,47
5	Kab. Klungkung	10,89	10,22	6,07	5,61
6	Kab. Bangli	12,17	12,24	5,28	5,28
7	Kab. Karangasem	29,45	27,83	6,98	6,56
8	Kab. Buleleng	41,68	39,52	6,21	5,85
9	Kota Denpasar	30,02	27,69	2,97	2,68
	<b>Provinsi Bali</b>	<b>205,68</b>	<b>193,78</b>	<b>4,57</b>	<b>4,25</b>

Sumber data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

Indikator lain yang bisa disampaikan mendampingi indikator tingkat kemiskinan wilayah, di antaranya adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)/ *poverty gaps index* dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Untuk mengetahui masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *poverty severity index*. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara rinci Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan seperti pada Tabel berikut :





Tabel 1.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan  
di Kabupaten Badung Tahun 2016-2023

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2016	0,19	0,05
2	2017	0,21	0,05
3	2018	0,28	0,07
4	2019	0,16	0,03
5	2020	0,31	0,07
6	2021	0,43	0,10
7	2022	0,29	0,05
8	2023	0,01	0,01

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adapun kategori nilai indeks gini rasio yaitu:  $0 < 0,35$  menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran  $0,35-0,5$  menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio  $> 0,5$  menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 menunjukkan ketimpangan pendapatan tingkat rendah. Akan tetapi kondisi ini perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perkembangan gini ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 - 2023 seperti pada Tabel berikut :



Tabel 1.8

Perbandingan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021- 2023

No	Kabupaten	2021	2022	2023
1	Kab. Badung	0,33	0,32	0,28
2	Kab. Tabanan	0,31	0,30	0,35
3	Kab. Jembrana	0,32	0,33	0,33
4	Kab. Gianyar	0,33	0,31	0,32
5	Kab. Klungkung	0,35	0,35	0,34
6	Kab. Bangli	0,29	0,29	0,28
7	Kab. Karangasem	0,32	0,30	0,34
8	Kab. Buleleng	0,28	0,28	0,31
9	Kota Denpasar	0,38	0,37	0,34
	Provinsi Bali	0,38	0,36	0,36

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Badung Memiliki komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Selain itu pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas Kabupaten Badung dalam implementasi RB Tematik. Rincian Rencana Aksi RB Tematik pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9

Rencana Aksi RB Tematik Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Mengurangi Beban Masyarakat	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi siswa dari Keluarga tidak mampu	Peserta Didik	191	191	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima bantuan seragam sekolah	%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi siswa dari Keluarga tidak mampu	Peserta Didik	40	35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase Peserta Didik Sekolah Pertama yang menerima bantuan seragam sekolah	%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase 54 Sekolah Menengah pertama Swasta dan Negeri yang Menerima Dana BOS	%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase Peserta Didik Sekolah PAUD yang menerima bantuan seragam sekolah	%	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	%	100%	99%	Dinas Kesehatan



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Standar				
		Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100%	81%	Dinas Kesehatan
		Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100%	66%	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100%	127%	Dinas Kesehatan
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan	%	100%	100%	Dinas Kesehatan



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				
		Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase jumlah penerima Bantuan Iuran Jaminan	%	100%	100%	Dinas Kesehatan





No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Pemda Kelas 3 (236.459 Orang per bulan)				
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	25	25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Kelompok Lansia yang mendapat bantuan hibah uang	Kelompok Lansia	7	7	Dinas Sosial
		Jumlah disabilitas terlantar diluar panti sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	115	4681	Dinas Sosial
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	orang	50	50	Dinas Sosial



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	300	180	Dinas Sosial
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	26	Dinas Sosial
		Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	orang	100	100	Dinas Sosial



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Persentase 2021 Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	%	100%	100%	Dinas Sosial
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	0	Dinas Sosial
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	0	Dinas Sosial
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	15	140	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	layanan	5	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah dokumen rekomendasi upah minimum kabupaten yang di tanda tangani oleh Bapak Bupati	Dokumen	1	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja





No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase Jumlah penerima manfaat sebanyak 1.903 orang di seluruh desa se kabupaten Badung	%	100%	100%	Pemerintah Desa se - Kabupaten Badung
2	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	kelompok	6	6	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	405	500,71	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	82	82	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	5	5	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Persentase 18 Kelompok Sekaa dan Sanggar Seni yang mendapat	%	100%	1	Dinas Kebudayaan



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		pembinaan kesenian tradisional				
		Jumlah kelompok nelayan yang diberi bantuan hibah uang	kelompok nelayan	5	5	Dinas Perikanan
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	60	45	Dinas Perikanan
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	kelompok	55	55	Dinas Perikanan
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	kelompok	1	1	Dinas Perikanan
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	29	29	Dinas Perikanan
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	kelompok	2	2	Dinas Perikanan



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
		Jumlah kelompok pembudidayaan penerima hibah uang	kelompok	2	2	Dinas Perikanan
		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan hair styles dan pemberian alat kerja	orang	15	15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	Meminimalkan Kantong Kemiskinan	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	Ruang	2	2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	10	10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	10	10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	4	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	3	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail	Dokumen	1	0	Dinas Perumahan Rakyat dan



No	Rencana Aksi	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				Kawasan Permukiman
		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	18,83	18,83	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Verifikasi dan Monitoring)	Unit Rumah	630	630	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber Data : Rencana Aksi RB Kabupaten Badung Tahun 2023

### 1.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk

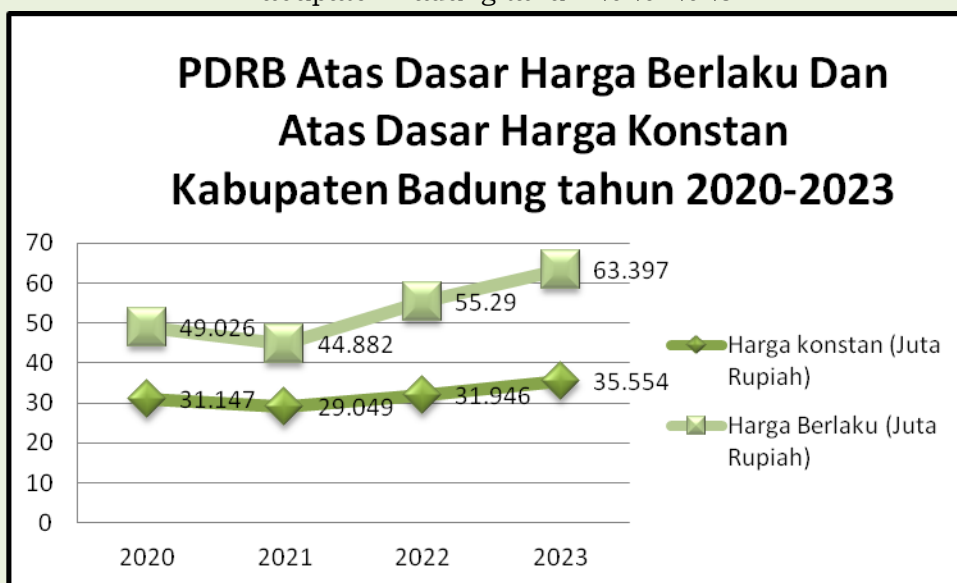




melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Gambaran PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2020-2023 seperti grafik berikut :

Grafik 1.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Badung tahun 2020-2023



Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

Nilai PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan secara linier. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu sebesar 11,29%.

#### 1.3.4. Gambaran Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat.

Ukuran untuk menilai keberhasilan dalam ketenagakerjaan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2020-2023 berfluktuatif, namun di tahun 2023 mengalami penurunan yang





cukup *signifikan* yakni sebesar 2,72 dari tahun 2022 yaitu sebesar 6,87%. Gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2020-2023 seperti Grafik berikut:

Grafik 1.3

Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT)  
di Kabupaten Badung tahun 2020-2023



Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024

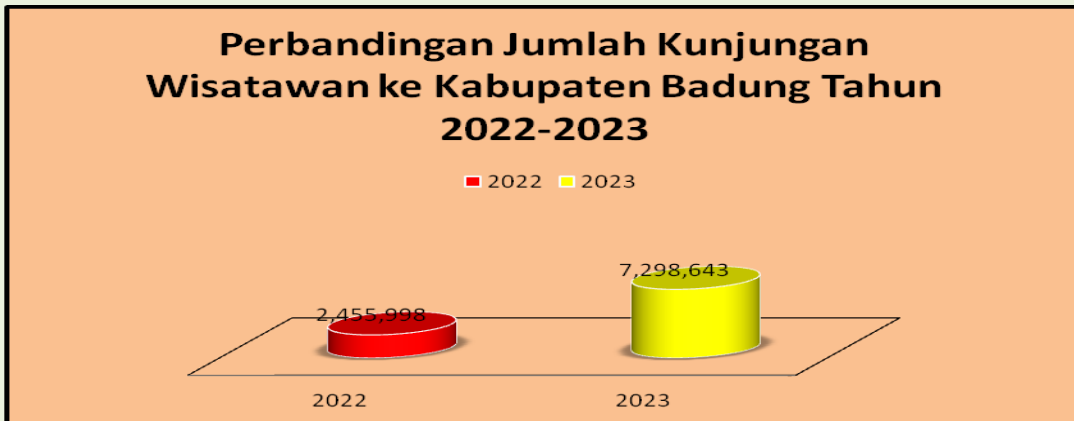
### 1.3.5. Gambaran Kepariwisata

Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali dan Nasional, karena memiliki banyak kawasan destinasi wisata yang sudah terkenal di manca negara. Adapun total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung sepanjang Tahun 2023 sebanyak 7,298,643 terdiri atas 5,386,878 kunjungan wisata mancanegara dan 1,911,765 kunjungan wisata domestik, dimana mengalami kenaikan dari Tahun 2022 yakni sebesar 2,455,998. Berikut perbandingan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2022-2023 seperti pada grafik berikut :



Grafik 1.4

Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan  
Ke Kabupaten Badung Tahun 2022-2023

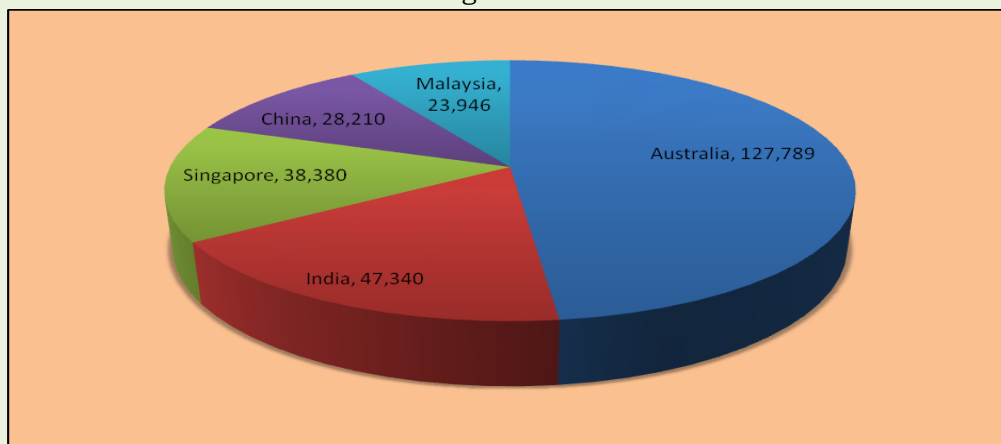


Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2023

Kunjungan wisatawan ke Badung pada tahun 2023 didominasi wisatawan mancanegara. Adapun wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung dalam rentang Tahun 2021-2022 berasal dari Negara Australia sebanyak 127,789 orang. Lima Negara teratas berkenaan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung pada tahun 2023 secara rinci seperti pada grafik berikut :

Grafik 1.5

Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 2023



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2023



## 1.4. Gambaran IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung tahun 2020-2022 menunjukkan kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan di tahun 2023 sebesar 83 termasuk kategori sangat tinggi melebihi pencapaian provinsi Bali yakni sebesar 78,01 serta nasional sebesar 74,39. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Perkembangan secara lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dari tahun 2020-2023 seperti grafik berikut :

Grafik 1.6  
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2020-2023



Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung Tahun 2023



## 1.5. Gambaran Pemerintahan

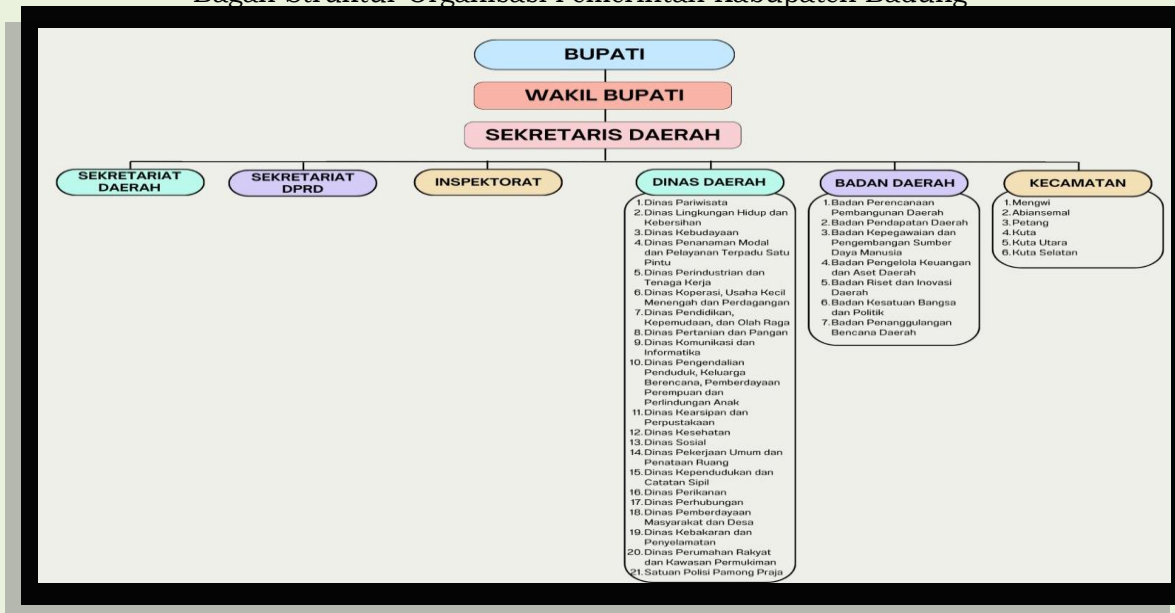
Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka susunan perangkat daerah telah mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah. Berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 37 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas dan 6 kecamatan. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Badung seperti gambar berikut :





Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung



Sumber data : Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Badung

Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 sebanyak 465 jabatan struktural. Secara lengkap jumlah, tipe dan jumlah jabatan structural/eselon seperti tabel berikut:

Tabel 1.10  
Jumlah, Tipe dan Jumlah Struktural  
Di Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	12			2	21
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3			1	5
3	Inspektorat;	A		1	6			1	8
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4		1	7
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4		2	8
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4		1	7
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1	8		1	11



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	2		9
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	2		8
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	7		13
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	A		1	1	6	1		9
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	1		8
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	1		7
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	1		7
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	11		17
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	2		8
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	1		6
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	2		9
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	B		1	1	3	2		7
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	1		6
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	8		13
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	2		7
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan;	B		1	1	3	8		13
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	B		1	1	3	2		7





NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	2		8
26	Badan Pendapatan Daerah	B		1	1	3	7		12
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	2		7
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;	B		1	1	3	5		10
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah;	B		1	1	3	1		6
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	A		1	1	3	1		6
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;	A		1	1	4	1		7
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	B		1	3	9			13
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemal;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan Kuta; dan	A			1	1	5	2	9
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5
55	UPTD						20	21	41
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	37	58	124	148	97	465

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung Tahun 2023

## 1.6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Badung menurut perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 6.459 orang. Jumlah pegawai ASN di Kabupaten Badung dalam 1 (satu) tahun telah berkurang sebanyak 431 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lengkap seperti berikut:

Tabel 1.11  
Distribusi Aparatur Sipil Negara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2023		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1.	SD	12	4	16
2.	SLTP	55	9	64
3.	SLTA	808	351	1159
4.	DIPLOMA I/II	37	35	72
5.	DIPLOMA III/IV	130	483	613
6.	S1/ S2/S3	2027	2508	4535
	<b>Jumlah</b>	<b>3069</b>	<b>3390</b>	<b>6459</b>

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2023



### 1.6.2. Distribusi Menurut Kepangkatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan tercatat, kepangkatan pegawai yang paling banyak golongan III/d sebanyak 1.166 orang (16.9%) sedangkan pegawai dengan kepangkatan I/a tidak ada. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan seperti berikut :

Tabel 1.12  
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan  
di Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	GOLONGAN	2023		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	1	1
3	I/c	3	3	6
4	I/d	16	3	19
5	II/a	24	4	28
6	II/b	133	44	177
7	II/c	143	38	181
8	II/d	537	249	786
9	III/a	112	178	290
10	III/b	593	747	1340
11	III/c	358	513	871
12	III/d	468	807	1275
13	IV/a	294	323	617
14	IV/b	327	434	761
15	IV/c	56	46	102
16	IV/d	5	0	5
<b>Jumlah</b>		3069	3390	6459

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2023

### 1.6.3. Distribusi Menurut Jenjang Jabatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan tercatat, jabatan yang paling banyak adalah fungsional tertentu sebanyak 3149 orang sedangkan untuk jabatan struktural yakni eselon IV.a yakni sebanyak 154 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan seperti tabel berikut:



Tabel 1.13  
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan  
di Kabupaten Badung Tahun 2023

Jabatan	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1081	2068	3149
Fungsional Umum	10	7	17
Pelaksana	1672	1167	2839
<b>Struktural</b>			
Eselon V.b	0	0	0
Eselon V.a	0	0	0
Eselon IV.b	58	40	98
Eselon IV.a	98	53	151
Eselon III.b	79	35	114
Eselon III.a	39	16	55
Eselon II.b	31	4	35
Eselon II.a	1	0	1
Eselon I.b	0	0	0
Eselon I.a	0	0	0
<b>Jumlah/Total</b>	<b>3069</b>	<b>3390</b>	<b>6459</b>

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2023

## 1.7. Sumber Daya Keuangan

Anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 7.478.386.773.983,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.217.630.404.830,66 atau sebesar 96,51%. Sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp. 8.542.741.852.056,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.288.076.935.695,36 atau sebesar 85,31%. Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 secara rinci seperti tabel berikut :



Tabel 1.14  
Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	7.478.386.773.983,00	7.217.723.734.830,66	96.51
	Pendapatan Asli Daerah	6.534.295.018.991,00	6.309.336.711.474,85	96.56
	Pendapatan Transfer	944.091.754.992,00	907.565.437.438,00	96.13
	Lain-lain Pendapatan yang sah	0	821.585.917,81 (terjadi dikarenakan adanya pengembalian dana hibah)	
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	7.288.170.265.695,36	7.288.076.935.695,36	85.31
	Belanja Operasi	5.284.526.227.336,00	4.590.476.818.929,98	86.86
	Belanja Modal	1.345.603.798.402,00	1.046.322.864.556,99	77.76
	Belanja Tak Terduga	89.324.365.806,00	24.363.145.000,00	27.27
	Transfer	1.823.287.460.512,00	1.627.007.437.208,39	89.23
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.095.442.182.073,00	1.095.443.127.485,46	100.00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.087.104.000,00	31.087.104.000,00	100.00
	Pembiayaan Netto	1.064.355.078.073,00	1.064.356.023.485,46	100.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0	993.909.492.620,76	

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Badung Tahun 2023 unaudited





## 1.8. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pembangunan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, maka tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor penyebab akar permasalahannya.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam upaya pencapaian target tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, antara lain :

1. Kapasitas Pembangunan Daerah Pendukung Indeks Kebahagiaan Daerah Kabupaten Badung
2. Potensi Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Kabupaten Badung
3. Tantangan infrastruktur dalam arti luas





## 1.9. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yaitu :

### 1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan harmonisasi, kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat
- b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan
- c) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan
- d) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan
- e) Melaksanakan pembinaan umat beragama dalam menciptakan toleransi hidup beragama
- f) Melaksanakan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- g) Melaksanakan monev. kepada umat beragama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

### 2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Arah Kebijakan :

- a) Penguatan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah
- b) Penguatan Manajemen Kinerja Perangkat daerah



- c) Penguatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting )
- d) Penguatan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja
- e) Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi Program Kegiatan
- f) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
- g) Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- h) Melakukan pembinaan dan penilaian internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- i) Meningkatkan Maturitas SPIP
- j) Melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat
- k) Melaksanakan pemeriksaan investigatif
- l) Melakukan pembinaan, monitoring dan verifikasi atas LHKPN dan LHKASN
- m) Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
- n) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada PD sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- o) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur
- p) Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah
- q) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah
- r) Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah
- s) Pemantauan program pelaksanaan pembangunan pembangunan
- t) Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD
- u) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- v) Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan diklat teknis pengawasan maupun ilmu pendukung



- w) Mengoptimalkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- x) Penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara mandiri (self assesment)
- y) Penjaminan kualitas (Quality Assurance) oleh BPK terhadap proses pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- z) Pengembangan secara mandiri (Self Improvement) kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- aa) Memanfaatkan teknologi untuk memperlancar penatausahaan dan pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- bb) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Teknologi Informasi
- cc) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM pengelola Teknologi Informasi
- dd) Meningkatkan Tata Kelola Persandian serta Operasional Pengamanan Informasi dan Komunikasi
- ee) Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral yang Akurat, Transparan dan Terintegrasi
- ff) Memberikan bimbingan teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa kepada aparatur dan pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- gg) Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa
- hh) Melakukan pengawasan internal
- ii) Mempercepat proses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kearsipan
- jj) Mendorong dan Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Melanjutkan Pendidikan Formal
- kk) Memfasilitasi ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural
- ll) Memberikan Reward sesuai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
- mm) Memberikan Punishment kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan
- nn) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau



- oo) Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
- pp) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas penyelenggara, pelaksana pelayanan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- qq) Penyederhanaan prosedur perizinan terkait kemudahan berusaha
- rr) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- ss) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta
- tt) Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan
- uu) Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi
- vv) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- ww) Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal
- xx) Memberikan kemudahan pelayanan penanaman modal dan penyederhanaan persyaratan investasi
- yy) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penanaman modal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
- zz) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan
- aaa) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan
- bbb) Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- ccc) Meningkatkan kualitas SDM Set.DPRD
- ddd) Meningkatkan kualitas koordinasi antara DPRD dan Set.DPRD serta koordinasi antar staf Set.DPRD dalam menjalankan fungsi pelayanan
- eee) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
- fff) Meningkatkan pelayanan publik yang mudah cepat dan aman
- ggg) Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui Teknologi Informasi (TI)





- hhh) Interpretasi hasil rata rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah
- iii) Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kearifan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih
- jjj) Mempersiapkan SDM yang handal di bidang kebakaran dan non kebakaran
- kkk) Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran, gas beracun dan penyelamatan pada seluruh elemen masyarakat
- lll) Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran dan penyelamatan  $\leq 15$  menit
- mmm) Sarana dan prasarana pendukung layanan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian, pencegahan kebakaran
- nnn) Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi
- ooo) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi untuk menciptakan layanan publik yang handal dan professional
- ppp) Memfasilitasi pelayanan administrasi permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia serta masyarakat sesuai ketentuan berlaku

### **3. Misi 3 : Mewujudkan Tatahan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada
- b) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan





- c) Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)
- d) Mengupayakan pembinaan yang intensif kepada masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku
- e) Mengintensifkan Patroli wilayah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- f) Melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada
- g) Melaksanakan Pembinaan kepada lembaga masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
- h) Monev. ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan
- i) Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- j) Cakupan continuum of care dengan melibatkan peran serta masyarakat
- k) Meningkatkan jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan
- l) Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- m) Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **4. Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal**

Arah Kebijakan :

- a) Mengaktifkan dan Membina Lembaga Seni
- b) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba
- d) Meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang lomba yang dilaksanakan
- e) Memantapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kreatifitas seni dan budaya daerah yang terdapat di masing-masing desa/ kelurahan
- f) Memantapkan koordinasi dan kerjasama dengan majelis alit, widyasabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat, seni dan budaya



- g) Mendorong sektor-sektor pariwisata untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal
- h) Melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya
- i) Menyelenggarakan Diklat di bidang seni dan budaya
- j) Menyelenggarakan lomba di bidang seni dan budaya
- k) Mendata warisan seni dan budaya

#### **5. Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat**

Arah Kebijakan :

- a) Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan mendorong program wajib belajar 12 tahun
- b) Pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas
- c) Meningkatkan profesionalisme/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- d) Pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran
- e) Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat yang berprestasi
- f) Meningkatkan kesempatan kerja
- g) Peningkatan produksi perindustrian
- h) Peningkatan produksi pertanian
- i) Peningkatan produksi perternakan
- j) Peningkatan produksi perikanan
- k) Penguatan permodalan UMKM
- l) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care ) dengan melibatkan peran serta masyarakat
- m) Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi
- n) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing
- o) Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- p) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan



- q) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta
- r) Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan
- s) Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile ), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
- t) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
- u) 10 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis
- v) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based )
- w) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa KLB)/wabah

## **6. Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat**

Arah Kebijakan :

- a) Memfasilitasi perijinan usaha
- b) Meningkatkan pemberdayaan usaha koperasi
- c) Meningkatkan kualitas koperasi
- d) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan koperasi
- e) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM
- f) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan moneyv KUR
- g) Mengadakan promosi baik yang berskala lokal maupun nasional
- h) Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk pelaku usaha
- i) Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha
- j) Melaksanakan monitoring harga
- k) Melaksanakan Tera/Ulang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan



**7. Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif**

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
- b) Menurunkan angka usia pernikahan dini
- c) Meningkatkan jumlah pekerja yang berkualitas pada sektor pariwisata dan sektor lainnya
- d) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
- e) Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya
- f) Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial

**8. Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam**

Arah Kebijakan :

- a) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) yang berbasis Agrowisata
- b) Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
- c) Meningkatkan kapasitas pelaku SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d) Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola Menetapkan kelembagaan pengelola
- e) Penyusunan data kunjungan wisatawan Melaksanakan Analisa pasar pariwisata Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media
- f) Menyelenggarakan gathering meeting dan travel fair dengan stakeholder pariwisata
- g) Meningkatkan kapasitas pelaku dan kualitas produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam
- h) Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan
- i) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan Penerapan teknologi tepat guna Meningkatkan perlindungan lahan pertanian
- j) Meningkatkan keanekaragaman produk komoditi pertanian
- k) Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan





- l) Peremajaan tanaman, ternak yang sudah tua dan rusak/mati
- m) Pengembangan, peningkatan dan pemelihara sarana dan prasarana pertanian
- n) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
- o) Meningkatkan perluasan akses pasar produk pertanian yang berbasis agroindustri
- p) Meningkatkan kualitas dan validitas data base pertanian
- q) Mengidentifikasi daerah rawan pangan
- r) Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan
- s) Meningkatkan nilai tambah produk perikanan
- t) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan
- u) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Industri Pariwisata
- v) Penyusunan database industri pariwisata
- w) Peningkatan kapasitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- x) Verifikasi kesiapan tata kelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19
- y) Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup

#### **9. Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi**

Arah Kebijakan :

- a) Mengoptimalkan pendampingan inovasi kepada perangkat daerah dan kelompok masyarakat baik secara komunal maupun personal
- b) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- c) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah
- d) Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi
- e) Mengembangkan akses promosi dan kerjasama penanaman modal
- f) Mewujudkan ketaatan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal





- g) Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan
- h) Meningkatkan kualitas dokumen kependudukan dengan menjadikan data kependudukan yang akurat dan transparan
- i) Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk
- j) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ketingkat Desa/Kel dan Banjar
- k) Pembangunan, Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat
- l) Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air, Peningkatan Penggunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air, Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya air dan Irigasi
- m) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum, Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, Peningkatan cakupan layanan persampahan,
- n) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, Peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara
- o) Perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang, peningkatan kinerja pemanfaatan ruang, peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang
- p) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- q) Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak
- r) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya Pengendalian titik permukiman kumuh
- s) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak ( air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan
- t) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestic
- u) Pembangunan sarana prasarana persampahan di kawasan
- v) Pembangunan infastruktur drainase lingkungan
- w) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Tepat waktu



- x) Pelaksanaan Verifikasi terhadap permohonan hibah uang, barang/jasa dan verifikasi terhadap PSU perumahan di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan
- y) Capaian realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target.

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2023 yaitu :

1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata.
2. Penanggulangan masalah kesehatan, ekonomi dan sosial akibat dampak pandemi COVID 19
3. Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID 19
4. Pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi.



## 1.10. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2023 disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| <b>Ringkasan Eksekutif</b>                       | Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2023.   |
| <b>Bab I Pendahuluan</b>                         | Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan.  |
| <b>Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b> | Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2023.   |
| <b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>             | Menyajikan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan |
| <b>Bab IV Penutup</b>                            | Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.  |

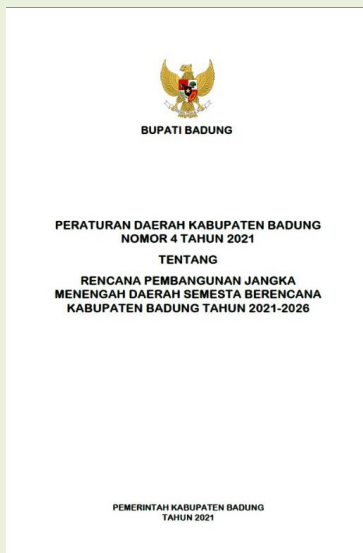


# BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

**D**alam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

## 2.1. RPJMD Semesta Berencana 2021-2026

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.



RPJMD Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2021-2026 pada tanggal 26





Pebruari 2021 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-259 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, telah menyusun RPJMD yang merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

Sasaran pokok dari RPJPD periode keempat tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang merupakan implementasi dari Ajaran Tri Sakti yaitu : **BERDIKARI DI BIDANG EKONOMI, BERDAULAT DI BIDANG POLITIK DAN BERKEPRIBADIAN DI BIDANG KEBUDAYAAN**. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karna serta Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka.

RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
PENGANGKATAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021-2026

**VISI**

**MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN  
MASYARAKAT BADUNG MELALUI  
PENGANGKATAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG  
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**



**MISI**

- 01 Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama
- 02 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Pembangunan, Teknologi Informasi Komunikasi
- 03 Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 04 Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal
- 05 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat
- 06 Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat
- 07 Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif
- 08 Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agrowisata dan Pelestarian Sumber Daya Alam
- 09 Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi





Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD  
Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
<b>VISI : “MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”</b>			
<b>Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama</b>			
1.	Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi</b>			
2.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	1. Nilai SAKIP
			2. Opini BPK
		2. Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		3. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tataan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>			
3.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada
4.	Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM	1. Terwujudnya Pemenuhan HAM	1. Capaian Atas Kepedulian HAM
<b>Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal</b>			
5.	Terwujudnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	1. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	1. Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
<b>Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat</b>			
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia
<b>Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat</b>			
7.	Terwujudnya UMKM sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya persentase koperasi sehat	1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat
		2. Meningkatnya jumlah wirausaha	2. Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha
		3. Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	3. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
<b>Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif</b>			
8.	Terwujudnya kebahagiaan masyarakat	1. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan
		2. Menurunnya angka kemiskinan	2. Persentase Penduduk Miskin
<b>Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam</b>			
9.	Terwujudnya Kepariwisata Berorientasi Pertanian dan Agroindustri	1. Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	1. Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian
		2. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	2. Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam
10.	Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian sinergi dengan sektor Pariwisata Berkelanjutan	1. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	1. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
			2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		2. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

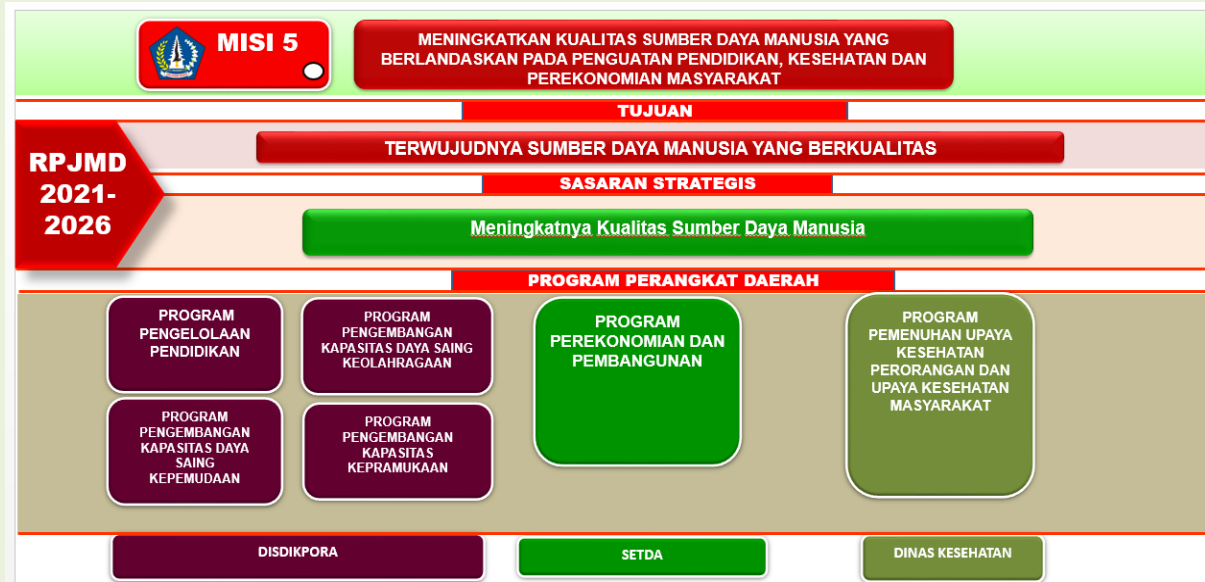


NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<b>Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi</b>			
11.	Terwujudnya Daya Saing Daerah yang Tinggi	1. Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta membangun akuntabilitas kinerja yang semakin baik, maka Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 telah dirumuskan secara terukur dan akuntabel. Untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Badung yang lebih fokus, efektif, efisien dan akuntabel maka masing-masing sasaran strategis dilakukan penyesuaian serta *cross cutting program*. Adapun contoh penyesuaian program untuk pencapaian sasaran strategis RPJMD seperti berikut :

Grafik 2.1  
*Cascading dan Cross Cutting*  
RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026





Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator kinerja Utama maka setiap sasaran RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pendekatan pohon kinerja dan cascading.

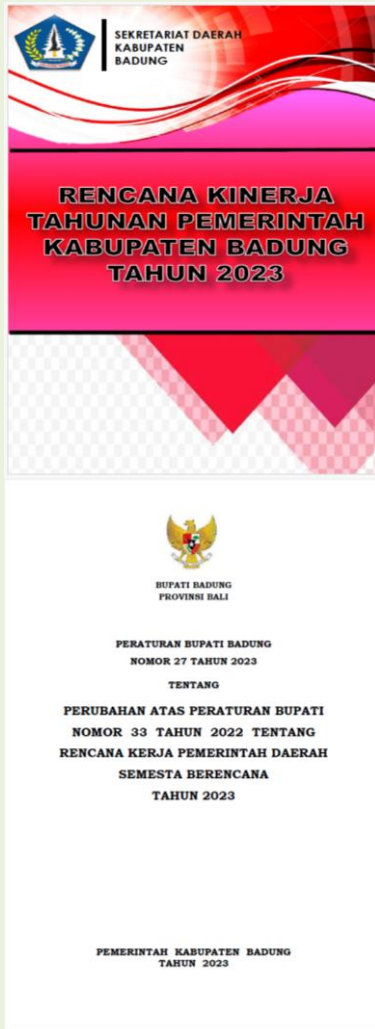
## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun ke-2 (Tahun kedua) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rencana Kerja Pemerintah





Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026. Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun

tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 sebagai berikut :

**"PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL"**





Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi dan Budaya
5. Pariwisata
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, dan Pengendalian Penduduk
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

**“MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI : HIJAU TANGGUNG DAN SEJAHTERA”**



Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata
6. Penguatan Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 sesuai dokumen RKT dan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Badung 2023 secara rinci, seperti tabel berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	82
			(Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,00
		Opini BPK	(BB) WTP
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2
			(Baik)
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	57,65
			(Sangat Rendah)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50
			(Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90.00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75.00
			(Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	71%

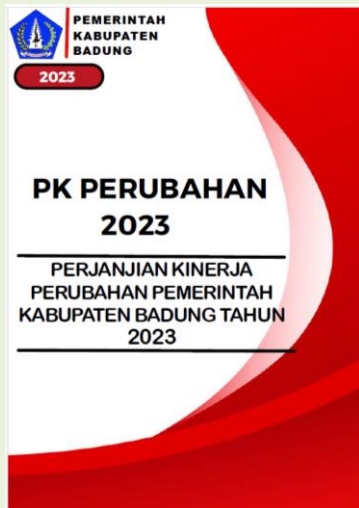


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81.61
			(Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	7.00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	20.00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,54%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76.64
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,95%
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	5,12%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31.67%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	94,73
			(Defisit)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100.40
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	25,00%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.64
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7582
			(Tinggi)



### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah), selanjutnya merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya serta realisasi perjanjian kinerja dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam kerangka perencanaan kinerja jangka menengah. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.





Tujuan perjanjian kinerja adalah : 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*); 5) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2023 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021 – 2026, dan telah ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2023 dan perjanjian kinerja perubahan ditetapkan tanggal 23 Oktober 2023 seperti berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	82
			(Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,00
			(BB)
		Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2
			(Baik)
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
			(Sangat Rendah)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50
			(Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90.00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75.00
			(Peduli HAM)





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	71%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81.61 (Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	7.00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	20.00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,54%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76.64
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,95%
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	5,12%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31.67%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	94,73 (Defisit)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100.40
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	25,00%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.64 (Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7582 (Tinggi)



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan (15 indikator), 19 sasaran dan 22 indikator kinerja utama (IKU). Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2021-2026 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih ditingkatkan karena memang mengalami permasalahan yang beragam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2023 dilakukan terhadap sasaran rencana strategis RPJMD tahun 2021-2026, dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja tahun 2023 merupakan periode kedua dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja dilakukan hanya terhadap capaian sasaran strategis jangka pendek Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dilakukan



dengan mengukur capaian indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis  
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	82 (Sangat Tinggi)	93,4	114
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,00 (BB)	76,07 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	100
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,2 (Baik)	3,66 (Sangat Baik)	114
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	57,65 (Sangat Rendah)	74,84 (Sedang)	130
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,50 (Baik)	89,52 (Sangat Baik)	105
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	89,55	119
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	71%	100%	141
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,61 (Sangat Tinggi)	83,08 (Sangat Tinggi)	102
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	7,00%	24,38%	348



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SAT UAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	20,00%	15,09%	75
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,54%	8,9%	93
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	76,64	78,69	103
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,95%	2,30%	-118
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	5,12%	5,12%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,67%	49,08%	155
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	94,73 (Defisit)	114,25	121
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,40	113,94	113
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	25,00%	24,67%	99
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,64 (Sedang)	69,06	112





NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7582 (Tinggi)	3,7800	101
	<b>Total Kinerja</b>						<b>2,434</b>
	<b>Rata-rata Kinerja</b>						<b>111</b>

## 3.2. Analisis Capaian Kinerja

### 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Startegis RPJMD Semesta Berencana Tahun 2023

Dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah terpilih selama lima tahun pemerintahannya maka kepala daerah dalam menyusun RPJMD merumuskan sasaran yang ingin dicapai sesuai peraturan perundang-undangan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan isu-isu strategis, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 ditetapkan 19 sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Hasil analisis capaian sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung pada tahun 2023 diuraikan secara rinci per masing-masing sasaran.





## Analisis Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama

**K**abupaten Badung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang masyarakatnya dinamis dan heterogen dari perspektif agama, sosial-budaya-politik sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius tentang kerukunan umat beragama untuk menjaga wilayah Kabupaten Badung. Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Badung menjadi perhatian yang serius sehingga menjadi salah satu indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Indikator Sasaran strategis RPJMD meningkatnya toleransi hidup beragama adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yang dimaksud kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai.

Indeks Kerukunan Umat Beragama dinilai dari tiga indikator yang digunakan dalam riset ini yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kementerian Agama RI juga membuat kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi beberapa kategori nilai, yaitu :

- a) Sangat Tinggi : > 80
- b) Tinggi : 60-80
- c) Sedang : 60-40
- d) Rendah : < 40



Sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Beragama pada tahun 2023 dari target 82 memiliki angka realisasi sebesar 93,4 dengan kategori sangat tinggi. Pelaksanaan Survey dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung bekerjasama dengan Universitas Hindu Indonesia pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023. Sasaran ini didukung 1 (satu) program. Program yang mendukung pencapaian target sasaran ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dengan pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 sebesar Rp.3,516,127,816,- dan terealisasi Rp.2,797,416,687,- dengan serapan anggaran 80%

Sebagai perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 sebesar 80,24 dan bila dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa hasil capaian sebesar 93,4 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 82. Dengan target dan capaian tahun 2023 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi (nilai >80).

Grafik 3.1

Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung Tahun 2018-2023



Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung



Terciptanya kerukunan umat beragama yang tinggi di Kabupaten Badung tidak terlepas dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberagaman. Adanya rasa saling menghargai antar sesama umat beragama, peran serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman bagi umatnya, serta tingginya sinergitas tokoh adat dan tokoh masyarakat antar agama yang menciptakan suatu kerukunan umat beragama. Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi indeks kerukunan umat beragama dengan kategori nilai sangat tinggi di Kabupaten Badung meliputi :

- 1) Kesadaran terhadap konstitusi empat pilar pokok yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai-nilai perekat bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh secara konsekwen oleh semua lapisan masyarakat dalam keberagaman hidup beragama.
- 2) Peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa membangun sinergisitas agar terbangun keharmonisan yang baik di lingkungan desa dan kelurahan sehingga tercipta tri kerukunan umat beragama yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah
- 3) Peran tokoh agama sebagai *opinion leader* terhadap umatnya sudah berjalan dengan baik sehingga kerawanan konflik yang akan muncul sangat rendah dan bahkan belum pernah muncul konflik tersebut.
- 4) Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai kebijakan yang mengayomi seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada dengan membangun komunikasi dan kerukunan lintas agama dengan mengedepankan aspek-aspek persamaan bukan menggali perbedaan-perbedaan yang memang sudah pasti ada.
- 5) Berdasarkan aspek idiologis, historis serta sosiologis masyarakat Kabupaten Badung memiliki latar belakang pendidikan, wawasan dan pemahaman, serta tingkat intelektual yang baik menjadi nilai kekuatan pada aspek toleransi masyarakat Kabupaten Badung khususnya pada daerah yang heterogenitasnya tinggi.



Walaupun indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi namun ada beberapa faktor penghambat atau tantangan kedepan yang mempengaruhi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung antara lain :

1. Adanya kecenderungan umat beragama lebih eksklusif atau bersifat radikal dan intoleran dan pandangan subyektif dalam memandang kebenaran agama lain.
2. Munculnya sikap militan yang sangat berlebihan dalam kehidupan beragama.
3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan dapat tercipta tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi maupun maknanya.
4. Makin bergesarnya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistis.

Strategi yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kerukunan umat beragama yaitu Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan perannya dalam tri kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama meliputi :

- 1) Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*.
- 2) Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan.
- 3) Membangun dan mengembangkan kegiatan lintas agama antar generasi muda dan masyarakat umumnya lintas agama sehingga akan tumbuh pemahanan ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat
- 4) Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.





- 5) Memperkuat dasar-dasar tri kerukunan beragama antara lain: kerukunan internal umat beragama, antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- 6) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- 7) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif yang mendukung pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- 8) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
- 9) Meningkatkan pemahaman umat beragama untuk menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Analisis Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, hal ini terlihat dalam RPJMD 2021-2026 dengan perumusan sasaran strategis Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel.

#### **Indikator 1 : Nilai SAKIP**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan demikian maka setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan akuntabilitas kinerja atau dengan kata lainnya



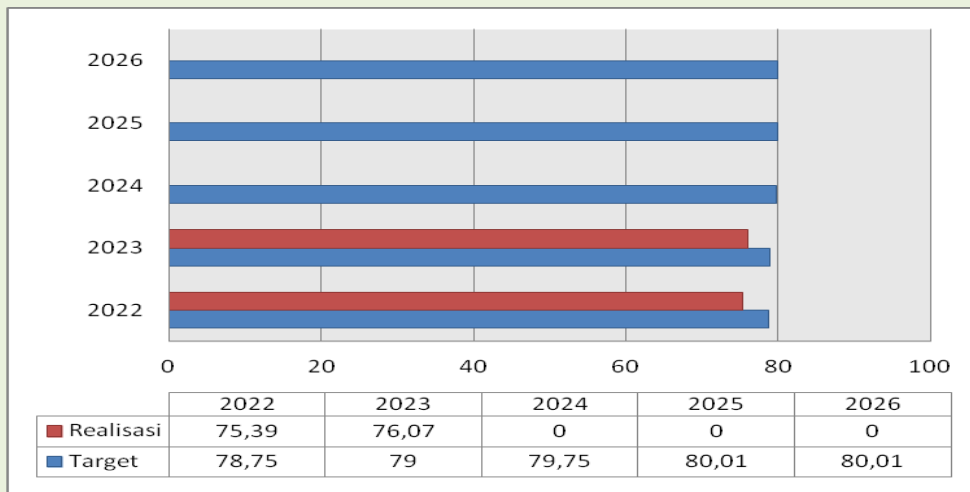


bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan hasil dari setiap anggaran yang dipergunakan serta faktor keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi.

Hasil capaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator Nilai SAKIP tahun 2023 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada tanggal 27 November 2023 dan untuk Kabupaten Badung mendapatkan nilai sebesar 76,07 dengan predikat “BB” dari target yang ditetapkan sebesar 79,00 dengan predikat “BB” sehingga hasil capaian kinerja menjadi 96% namun belum mencapai target. Sebagai bahan perbandingan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung untuk tahun 2022 sebesar 75,39 dengan predikat “BB”. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai sebesar 0,68 dimana dari 4 komponen penilaian, pada setiap komponennya terjadi peningkatan nilai walaupun tidak signifikan.

Secara lengkap target dan hasil capaian indikator nilai SAKIP pemerintah Kabupaten Badung tahun 2021-2026 seperti grafik berikut :

Grafik 3.2  
Target dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Badung  
Tahun 2021-2026



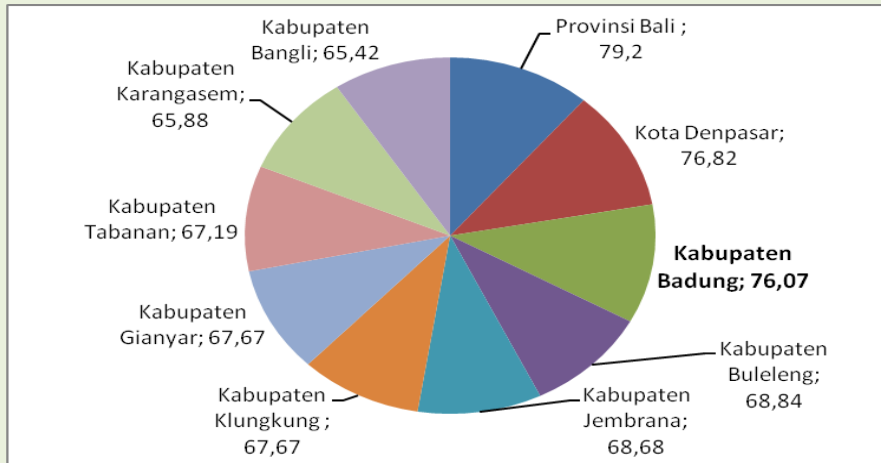
Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung

Hasil capaian nilai SAKIP Kabupaten Badung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali tahun 2023 menunjukkan nilai SAKIP Kabupaten Badung ada di peringkat ke-dua setelah Kota Denpasar. Perbandingan nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2022 dapat dilihat seperti grafik berikut :



Grafik 3.3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023

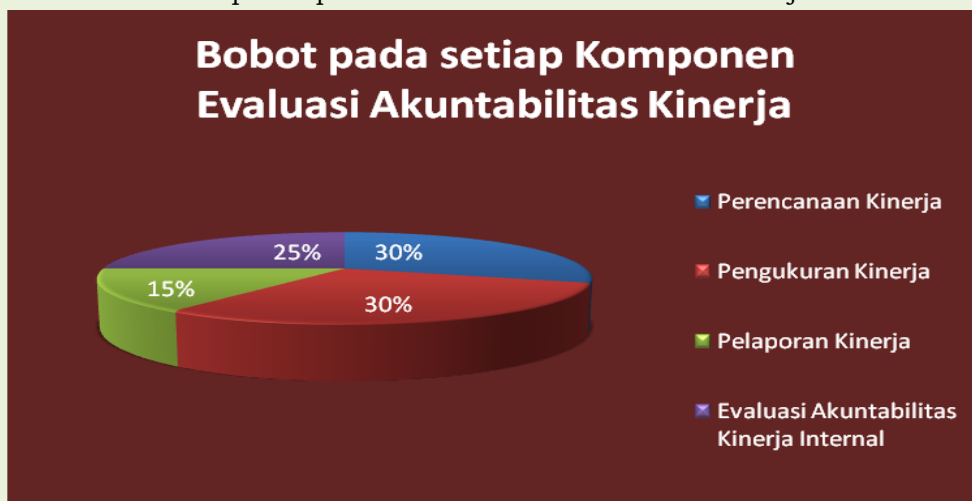


Sumber data : Biro Organisasi Provinsi Bali

Pada tahun 2023 evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana evaluasi menggunakan 4 komponen yang terdiri dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dimana pada masing-masing komponen memiliki bobot sebagai berikut :

Grafik 3.4

Bobot Pada Setiap Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023



Sumber data : Kementerian PAN &RB



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator pertama yaitu Nilai SAKIP didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisten. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator pertama yaitu Nilai SAKIP sebesar Rp. 7.631.895.606,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.866.311.807,- dengan serapan anggaran sebesar 64%.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan SAKIP menjadi budaya kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja serta secara bertahap mengubah mindset ASN agar lebih berorientasi kinerja melalui upaya penyelarasan program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran RPJMD. Melalui penerapan Pohon Kinerja dan *refocusing program* mampu mencegah *inefisiensi* anggaran dan kini telah dirasakan manfaatnya dengan adanya perubahan *mindset* dalam perencanaan dan penganggaran serta adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi program/kegiatan akan berdampak terhadap efisiensi anggaran.

Dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung maka berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran. Efektivitas dan efisiensi dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung seperti data pada tabel berikut berikut :



Tabel 3.2  
Data Efisiensi Pagu Indikatif RKPD  
dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Uraian	RKPD (Induk) Tahun 2023		RKPD (Perubahan) Tahun 2023	
		USULAN	PENETAPAN	USULAN	PENETAPAN
1	Jml. Program	214	210	224	224
2	Jml. Kegiatan	273	275	275	275
3	Jml. Sub Kegiatan	754	811	858	858
4	Jml. Pagu Indikatif	4.375.375.627.634	3.874.804.126.903	8.466.485.043.915	8.466.485.043.915
	<b>Efisiensi Pagu Indikatif</b>	<b>500.571.500.731</b>		-	

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 (Data berdasarkan SIPD)

Faktor pendorong terhadap pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator pertama yaitu Nilai SAKIP antara lain: Adanya komitmen Pimpinan kepala daerah untuk meningkatkan SAKIP, Telah terbentuknya Sistem berbasis elektronik (aplikasi e-SAKIP Badung) yang digunakan dalam perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, Dukungan anggaran untuk implementasi kegiatan, serta *refocusing* program melalui *cross cutting* program telah menunjukkan peningkatan kualitas AKIP di Kabupaten Badung.

Faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi SAKIP antara lain: komitmen beberapa pimpinan OPD masih belum optimal dimana implementasi SAKIP masih bersifat administratif (dokumen SAKIP), perubahan regulasi pada perencanaan dan keuangan seperti terbitnya permendagri 90 tahun 2019 dan pemberlakuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), implementasi pohon kinerja kedalam dokumen anggaran belum dapat dilakukan, evaluasi internal kinerja oleh OPD belum optimal,





belum optimalnya tindak lanjut OPD terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, dan belum optimalnya kompetensi SDM tentang SAKIP.

Strategi dan upaya untuk lebih meningkatkan nilai SAKIP antara lain: revisi pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP, pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah/pejabat yang membidangi SAKIP, pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja masing-masing perangkat daerah, pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Badung dengan baik untuk implementasi SAKIP dan pemberian Reward dan punishment bagi perangkat daerah.

## Indikator 2 : Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

1. **Opini WTP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.





2. **Opini WDP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
3. **Opini TMP** diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.
4. **Opini TW** diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK tahun 2023 Kabupaten Badung memperoleh predikat WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga capaian kerjanya sebesar 100%, berarti telah mencapai target yang ditetapkan. Target dan capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2021 - 2023 seperti grafik berikut:



Grafik 3.5

Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2021-2023



Keterangan : 1. Tidak Wajar (TW/ Adverse Opinion) 2. Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) 3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion) 4.Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion).

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, dilakukan berbagai upaya melalui penyajian laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik mulai dari perencanaan sampai penatausahaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dapat menyajikan data dan informasi nilai asset yang sebenarnya sesuai jenis-jenis asset, jumlah, keberadaan dan kondisinya.

Total nilai asset tetap Pemerintah Kabupaten Badung yang terdiri dari Realisasi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, belanja Bangunan dan Gedung dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 sebesar 1.021.621.471.040,99 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 702.182.033.621. Nilai asset tetap lebih tinggi dibandingkan dengan nilai asset tetap lainnya. Distribusi nilai asset Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2022-2023, sebagai berikut :



Grafik 3.6

Nilai Asset Kabupaten Badung Tahun 2022-2023

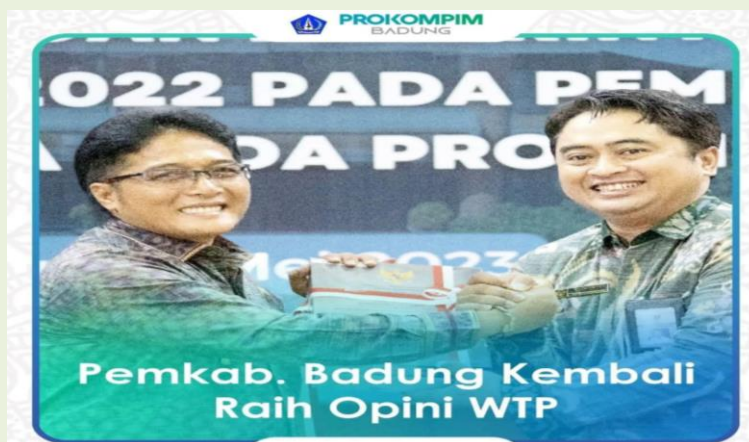


Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Kabupaten Badung pada tahun 2021-2023 telah berhasil mempertahankan opini WTP sesuai dengan target yang ditetapkan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) berarti opini audit terhadap laporan keuangan yang diterbitkan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung oleh auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Gambar 3.1

Penghargaan Opini WTP Tahun 2023



Sumber data : Bagian Prokompim Kabupaten Badung



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.017.446.854.166,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.215.318.195.675,- dengan serapan anggaran sebesar 60%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK meliputi : komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, telah memiliki kebijakan tentang risiko yaitu Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, adanya pendampingan dan kerjasama dengan BPKP perwakilan Bali dan Kementerian Dalam Negeri, pembinaan dan rekonsiliasi dilakukan secara berkala dengan seluruh OPD baik akutansi pelaporan dan asset, pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator ke-dua yaitu Opini BPK meliputi : masih adanya temuan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, keterlambatan akumulasi data asset sehingga terjadinya keterlambatan penyusunan LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah), belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIMDA NG dan belum terintegrasinya sepenuhnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dengan SIMDA BMD.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain : Melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan seluruh OPD, penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akutansi pemerintah (SAP), prioritas transaksi keuangan secara non tunai, realisasi anggaran disesuaikan dengan anggaran kas, , pembinaan tentang penatausahaan SIMDA NG dan pembinaan tentang akutansi pelaporan pada SIMDA NG.





### Analisis Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel

**B**irokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan professional. Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Birokrasi yang sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari perumusan sasaran strategis Meningkatkan Birokrasi Yang Kapabel dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

#### Indikator 1 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan





nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Sehingga dirumuskan Indeks SPBE sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Sasaran Mengingkatnya Birokrasi Yang Kapabel.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,66 dengan predikat “sangat baik” dari target 3,2 dengan predikat “baik” sehingga capaian kinerja sebesar 114%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh Indeks SPBE sebesar 2,48 dengan predikat “Cukup” dari target 3,1 dengan predikat “Baik” sehingga capaian kinerja sebesar 80%. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung untuk indeks SPBE telah mengalami peningkatan sebesar 1,18 dan capaian kinerja juga melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan indeks SPBE Tahun 2021-2023 yang terus mengalami peningkatan seperti dalam grafik berikut :

Grafik 3.7

Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2021-2023



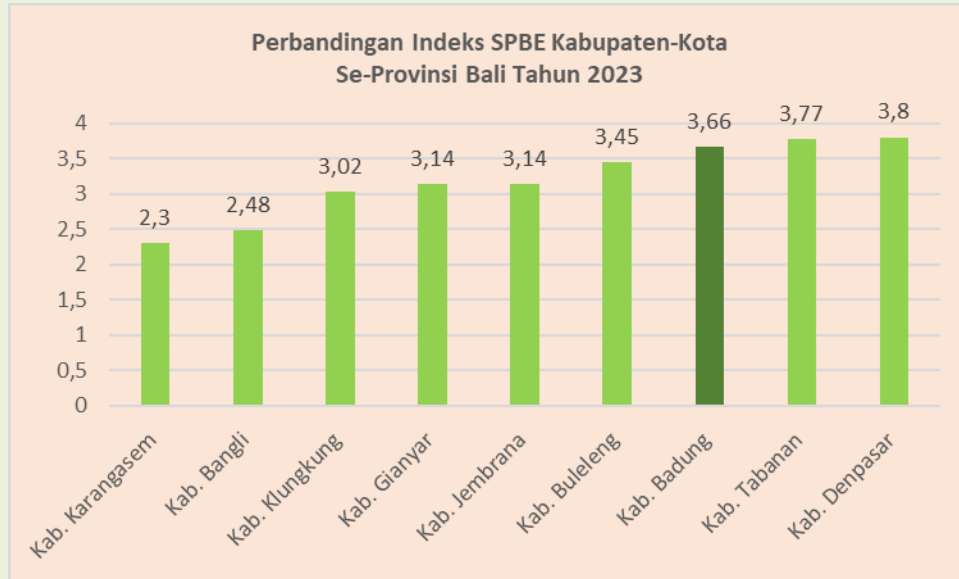
Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung



Sedangkan dari data perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Indeks SPBE Kabupaten Badung menempati posisi ketiga, seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik 3.8

Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-satu yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kepegawaian, Program Pengelolaan Arsip dan Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 253.029.474.518,- dengan realisasi sebesar Rp. 227.801.941.958,- dengan serapan anggaran sebesar 90%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-satu yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi : komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan optimal sehingga mampu dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga nantinya dapat menghasilkan Layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan



tugas dan fungsi bagi aparatur Sipil Negara, instansi pusat, pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-satu yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi : belum disusunnya peta rencana dan arsitektur SPBE .

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antara lain : Disusunnya master plan/ rencana induk SPBE dan telah disahkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar kedepannya dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam penerapan SPBE serta akan dilaksanakannya audit TIK untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Badung yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

## Indikator 2 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)


Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu



sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Berikut contoh rumus penghitungan Indeks Profesionalitas ASN :

Gambar 3.2  
Rumus Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN

### FORMULA



Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu **jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator**

$$IP = \sum_{i=1}^n IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$


$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

### SUMBER



1. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
2. Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)
3. Penilaian prestasi kerja PNS
4. Data hukuman disiplin pegawai

Sumber : Buku Saku IP ASN unggahan BKN

Gambar 3.3  
Kategori Tingkat IP ASN

### KATEGORI TINGKAT IP ASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

### HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN MENGGAMBARKAN

- Indeks Profesionalitas ASN Nasional
- Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pusat dan Instansi Daerah
- Indeks Profesionalitas ASN kelompok jabatan

Sumber : Buku Saku IP ASN unggahan BKN





Grafik 3.9

Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN  
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2023



Sumber data : BKPSDM Provinsi Bali

Berdasarkan Grafik diatas, Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2023 memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 74,84 dengan kategori “Sedang” dari target 57,65 dengan kategori “Sangat Rendah” sehingga capaian kinerja melebihi target yaitu 130%. Sedangkan pada tahun 2022 memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 65,87 dengan kategori “Rendah” dari target 52,7 dengan kategori “Sangat Rendah” sehingga capaian kinerja yaitu 125%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung mengalami peningkatan sebesar 5%. Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN didukung oleh 2 program. Program pendukung meliputi : Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15.123.963.759,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.228.597.004,- dengan serapan anggaran sebesar 81%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-dua yaitu Indeks Profesionalitas ASN meliputi : komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan Sosialisasi yang melibatkan seluruh ASN di Kabupaten Badung baik secara online maupun offline, dan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan baik teknis, fungsional dan manajerial dengan





memberikani sertifikat pengembangan kompetensi diakhir kegiatan serta dilaksanakannya rekonsiliasi data secara rutin serta penginputan ulang data kualifikasi dan kompetensi di SAPK.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang kapabel dengan indikator ke-dua yaitu Indeks Profesionalitas ASN meliputi : Informasi tentang Nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi sepenuhnya ada pada SIASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara, sehingga terkendala ketika sistem pusat ada *maintanance* dan informasi hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tidak ditemukan oleh Instansi serta masih kurangnya kesadaran ASN untuk menginput / mengupdate data kompetensi dan kinerja pada SIASN yang merupakan dimensi2 pokok dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN antara lain : melaksanakan sosialisasi dan rekonsiliasi data secara berkala , update data kompetensi dan kinerja ke SIASN dan Menginformasikan hasil Pengukuran IP ASN masing-masing Unit Organisasi dan masing-masing individu ASN.

#### **Analisis Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas**

**P**elayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu evaluasi implementasi pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat (SKM).



Indeks kepuasan masyarakat dihitung dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Unsur Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi: 1) persyaratan 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6) Kompetensi pelaksana 7) Perilaku pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan 9) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan kesembilan unsur maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat seperti tabel berikut :

Tabel 3.3  
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu  
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sasaran meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai standar yang cepat, mudah, murah, nyaman dan ramah sebagai wujud pelayanan prima.

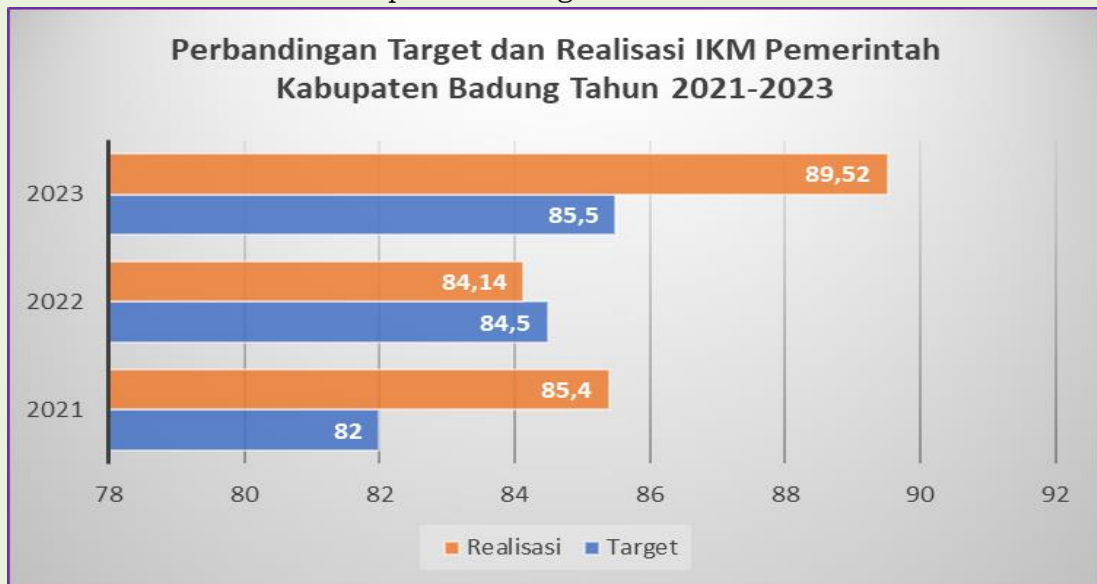
Hasil pengukuran sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 89,52 dari target 85,50 sehingga capaian kinerja menjadi 105% melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 84,14 dari target yang ditetapkan 84,5 sehingga kinerjanya sebesar 99,57%, yang artinya tahun 2022 hampir memenuhi target. Hasil capaian Indeks kepuasan



masyarakat sebesar 89,52 termasuk indeks kepuasan masyarakat kategori sangat baik (interval nilai 88,31 – 100).

Hasil capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 indeks kepuasan masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Hasil capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 85,4 telah melampaui dari target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar 82. Perbandingan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung tahun 2021-2023 seperti grafik berikut:

Grafik 3.10  
Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat  
di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023



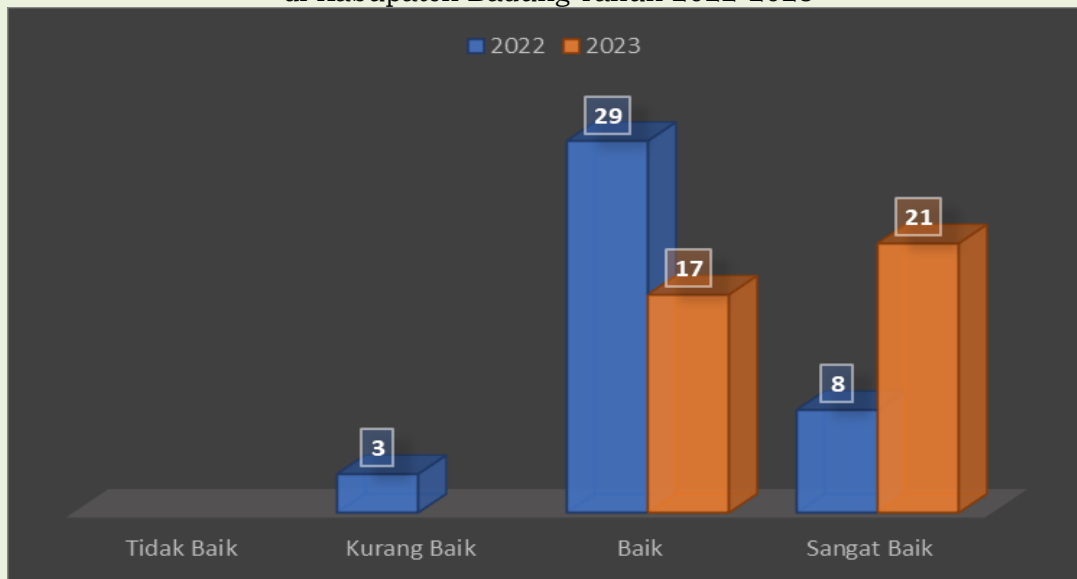
Sumber data : Badan Riset dan inovasi Daerah Tahun 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung tahun 2023 berdasarkan perangkat daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah lebih banyak termasuk Indeks Kepuasan Masyarakat kategori sangat baik, dibandingkan tahun 2022 masih ada sebagian kecil perangkat daerah dengan kategori kurang baik. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Secara lengkap kategori indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah sebagai berikut:



Grafik 3.11

Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023



Sumber data : Badan Riset dan inovasi Daerah Tahun 2023

Penilaian pelayanan publik di Kabupaten Badung juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut :

- Penyelenggara Mall Pelayanan Publik Kategori Prima
- Terbaik Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023
- Sertifikat Kepatuhan tinggi dari Ombudsman dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan public tahun 2023
- Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2023, dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Badung masuk TOP 99 dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung masuk TOP 15 melalui pengumuman Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/308/PP.00.05/2023





Gambar 3.4  
Penghargaan Penyelenggara Mall Pelayanan Publik



Gambar 3.5  
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Gambar 3.6  
Finalis TOP Inovasi 99 dan TOP Inovasi 15







Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah. Perangkat daerah dengan indeks kepuasan masyarakat paling tinggi dicapai oleh Dinas Sosial sebesar 99,09. Secara lengkap nilai indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah seperti tabel berikut:

Tabel 3.4  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2022-2023

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	TAHUN 2022	Tahun 2023
1	Sekretariat Daerah	82,91	86,25
2	Inspektorat	81,6	85,22
3	Sekretariat DPRD	82,61	90,67
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,53	98,40
5	Badan Pendapatan Daerah	77,34	86,53
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80,14	86,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	79,52	84,10
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah	93,06	92,69
9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	93,13	85,68
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87	88,41
11	Dinas Pariwisata	84,46	95,66
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,38	83,38
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81,48	88,89
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	88,14	82,55
15	Dinas Kebudayaan	88,61	98,75
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,85	94,03
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	91,78	94,64
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	83,05	84,15
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	80,9	83,65
20	Dinas Pertanian dan Pangan	80,56	93,79
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,75	88,74



No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	TAHUN 2022	Tahun 2023
22	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	86,83	89,82
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82,53	85,35
24	Dinas Kesehatan	83,66	86,42
25	Dinas Sosial	95,28	99,09
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,71	91,93
27	Dinas Perikanan	80,08	82,99
28	Dinas Perhubungan	71,82	90,43
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,44	86,91
30	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	82,07	89,44
31	Satuan Polisi Pamong Praja	88,61	93,58
32	RSUD Mangusada	80,06	94,42
33	Kecamatan Petang	86,26	83,79
34	Kecamatan Abiansemal	86,21	84,51
35	Kecamatan Mengwi	90	94,34
36	Kecamatan Kuta Utara	90,15	93,22
37	Kecamatan Kuta	88,43	87,74
38	Kecamatan Kuta Selatan	86,28	94,47

Sumber data : Badan Riset dan inovasi Daerah Tahun 2023

Program inovatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung secara nyata dilapangan mendapat apresiasi positif dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui sasaran ini diharapkan mampu mendorong seluruh OPD untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan berbagai program inovatif dalam pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi bekerjasama dengan ORI dan akademisi Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memperkuat kualitas SDM pelayanan publik. Hasil penilaian dari ombudsman Republik Indonesia (ORI) termasuk kategori kepatuhan tinggi (hijau).



Gambar 3.7  
Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman  
Tahun 2023



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didukung oleh 34 program. Program pendukung antara lain: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Pengelolaan Tanah Kosong, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program penanggulangan bencana, program Kebakaran Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jala (LLAJ), Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dan Program





Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 792.006.629.284,- dengan realisasi sebesar Rp. 712.237.709.350,- dengan serapan anggaran sebesar 90%.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya indeks kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dalam pelayanan publik mampu mendorong perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanannya
- b. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ada dalam katagori Baik. Hampir sebagian besar perangkat daerah telah menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan
- c. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk jaringan layanan internet untuk memudahkan perangkat daerah memberikan pelayanan secara online.
- d. Pelaksanaan survei menggunakan aplikasi *google form*.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya indeks kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia di bidang pemeliharaan perangkat keras dan jaringan komputer yang mendukung sistem informasi perizinan online masih terbatas
- b. Sistem Informasi Manajemen / SIM belum seluruhnya terintegrasi dengan perangkat daerah terkait.

Upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terkait prosedur dan mekanisme pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
- b. Pelayanan secara online dilaksanakan untuk mengatasi faktor penghambat peniadaan layanan tatap muka. Pelayanan online memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan





- c. Meningkatkan survei kepuasan masyarakat pada seluruh perangkat daerah berbasis teknologi informasi sehingga lebih update dan dapat terukur secara teratur seperti google form.
- d. Meningkatkan pembinaan kepada unit pelayanan publik.
- e. Meningkatkan inovasi pelayanan publik sehingga lebih responsive, cepat, akurat dan berkeadilan
- f. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima), untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
- g. Melakukan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/ komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
- h. Membuat kebijakan pemberian *reward* kepada pengguna layanan apabila pelayanan diluar ketentuan/SOP/SP.
- i. Meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan *website* resmi, telepon, *SMS center*, *Email*, dan atau penempatan Kotak Saran.

### Analisis Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada

Sesuai visi RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 Kabupaten Badung berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, artinya pemerintah menjamin masyarakat untuk merasa aman dan nyaman terhadap terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan. Komitmen

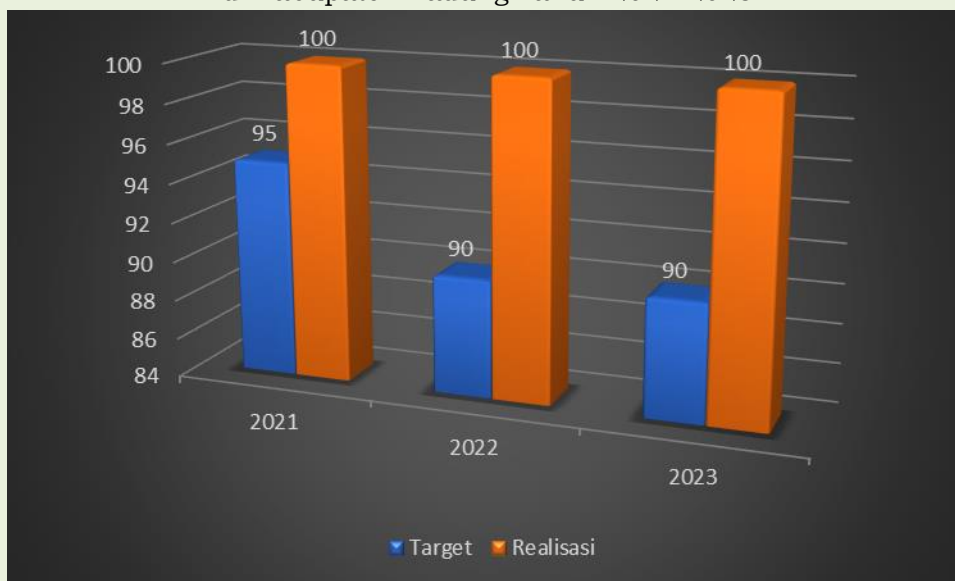


tersebut tertuang dalam sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada dengan indikator persentase penegakan perda dan perkada.

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada dengan indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga kinerjanya sebesar 111% berarti telah melampaui target RPJMD tahun 2023.

Hasil capaian indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2021 dan 2022. Gambaran target dan capaian indikator penegakan perda dan perkada tahun 2021-2023 seperti grafik berikut :

Grafik 3.12  
Target dan Realisasi Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada  
di Kabupaten Badung Tahun 2021-2023



Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2023

Berdasarkan data yang ada selama tahun 2023 terdapat indikasi pelanggaran perda/perkada sebanyak 3.108 potensi pelanggaran. Dari 3.108 kasus potensi pelanggaran yang ada maka yang dapat dicegah sebanyak 3.108 atau sebesar 100%. Berbagai upaya pencegahan dilakukan terhadap indikasi pelanggaran melalui tindakan preventif serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Secara lengkap jenis potensi pelanggaran yang dapat dicegah seperti tabel berikut:



Tabel 3.5

Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2023

No	KECAMATAN	JENIS POTENSI PELANGGARAN								JML	Reali sasi
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Petang	0	0	28	0	0	0	6	0	34	
2	Abiansemal	18	0	131	0	0	0	202	0	351	
3	Mengwi	185	7	462	9	0	0	485	0	1148	
4	Kuta Utara	278	4	249	11	0	0	519	0	1061	
5	Kuta	34	2	59	292	0	0	36	0	423	
6	Kuta Selatan	55	32	0	4	0	0	0	0	91	
	Kabupaten	570	45	929	316	0	0	1248	0	3108	

NO	KECAMATAN	POTENSI PELANGGARAN DI CEGAH								JML	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Petang	0	0	28	0	0	0	6	0	34	100
2	Abiansemal	18	0	131	0	0	0	202	0	351	100
3	Mengwi	185	7	462	9	0	0	485	0	1148	100
4	Kuta Utara	278	4	249	11	0	0	519	0	1061	100
5	Kuta	34	2	59	292	0	0	36	0	423	100
6	Kuta Selatan	55	32	0	4	0	0	0	0	91	100
	Kabupaten	570	45	929	316	0	0	1248	0	3108	

Keterangan : 1. IMB + Usaha tanpa ijin 2. Jalur Hijau 3. Reklame 4. Gepeng dan orang terlantar 5. Usaha Pariwisata 6. Pencemaran Lingkungan 7. Pelanggaran Trotoar 8. Pelanggaran Proses

Distribusi jenis potensi pelanggaran yang paling banyak berupa potensi pelanggaran trotoar sebanyak 1.248 pelanggaran. Sedangkan berdasarkan kecamatan maka pelanggaran yang paling banyak di Kecamatan Mengwi dengan potensi pelanggaran sebanyak 1.148 pelanggaran.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada didukung oleh 7 program. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program koordinasi



ketentraman dan ketertiban umum yang diampu oleh masing-masing dari 6 jumlah Kecamatan di kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.9.800.637.994,- dengan realiasi sebesar Rp. 7.684.934.396,- dengan serapan anggaran sebesar 78%.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator persentase penegakan perda dan perkara yaitu :

- Komunikasi dan strategi yang cukup baik antar lingkungan, desa/Kelurahan serta Dinas teknis terkait yang terlibat didalam pengaduan masyarakat
- Jalannya Sidak Tipiring harus selaras dengan Desa-desa atau Kelurahan sehingga mendapatkan hasil yang optimal
- Keterpaduan antar instansi terkait guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang taat dan tertib dalam setiap tindakan
- Memberikan Hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran untuk memberi efek jera
- Sarana dan Prasarana kerja cukup bagus dan lengkap
- Loyalitas personil yang baik dengan adanya jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten Badung

Dengan capaian yang sudah melebihi target namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam indikator persentase penegakan perda dan perkara tahun 2023 yaitu :

- Belum semua personil memiliki sertipikat Diklatsar Polisi Pamong Praja
- Kurangnya pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang – undangan
- Belum optimal ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui:

- Sinergitas semua perangkat Daerah, Instansi vertikal, Instansi Penegak Peraturan dalam pelaksanaan oprasional di lapangan (Satpol PP)
- secara bersama untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP)
- Melaksanakan secara konsisten MOU antar aparat dan Penegak Hukum yan terkait dengan tindak lanjut membuat Perjanjian Kerja Sama.





- d. Sosialisasi tentang peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
- e. Patroli keliling secara rutin
- f. Meningkatkan kemitraan dengan satuan keamanan lainnya
- g. Koordinasi dengan lintas sektor seperti dinas perijinan, dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup serta perangkat daerah lainnya.

### **Analisis Kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Pemenuhan HAM**

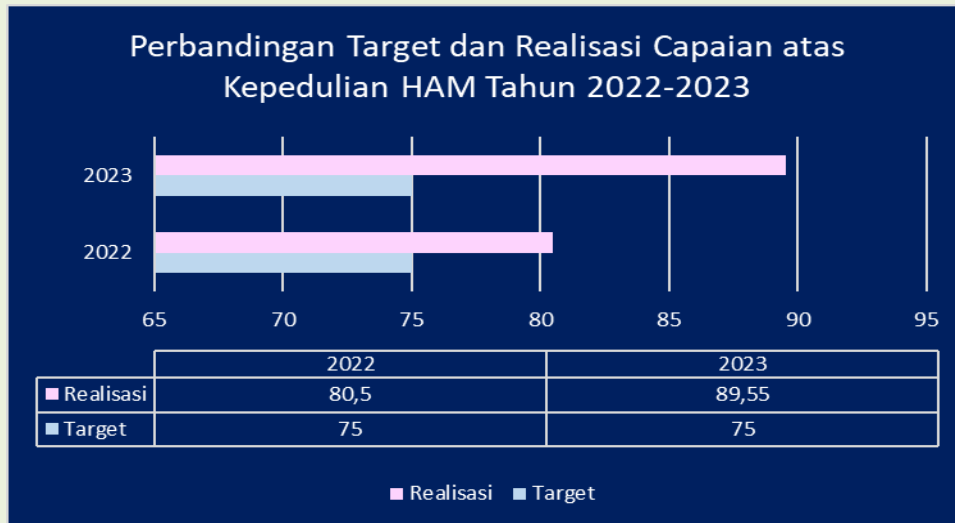
Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan sasaran strategis Terwujudnya Pemenuhan HAM pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan indikator Capaian atas Kepedulian HAM.

Hasil capaian indikator Capaian atas Kepedulian HAM tahun 2023 sebesar 89,55 dari target 75,00 dengan capaian kinerja 119% yang artinya melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 capaian atas kepedulian HAM sebesar 80,5 dari target 75,00 sehingga capaian kerjanya 107,33% melebihi target. Adapun perbandingan target dan realisasi capaian atas kepedulian HAM di Kabupaten Badung tahun 2022 dan 2023 seperti pada grafik berikut :



Grafik 3.13

Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023



Sumber data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung Tahun 2023

Penilaian HAM dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan rincian parameter penilaian seperti gambar berikut :

Gambar 3.8

Parameter Penilaian Capaian atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung

No	Parameter Penilaian	Nilai Capaian
<b>A</b>	<b>KELOMPOK HAK</b>	
1	Hak atas Bantuan Hukum	50
2	Hak atas Informasi	100
3	Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	100
4	Hak atas Keberagaman dan Pluralisme	85
5	Hak atas Kependudukan	95
6	Hak atas Kesehatan	93,5
7	Hak atas Pendidikan	75
8	Hak atas Pekerjaan	67
9	Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang Layak	90
10	Hak Perempuan dan Anak	90
	<b>Rata – Rata Nilai Sub Kelompok A</b>	<b>84,55</b>
<b>B</b>	<b>IMPLEMENTASI AKSI HAM 2022</b>	
	<b>Sub Total Nilai Kelompok B</b>	<b>5</b>
<b>C</b>	<b>PENGURANGAN NILAI</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>89,55</b>
<b>E</b>	<b>KRITERIA : PEDULI HAM</b>	

Sumber data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung



Upaya untuk mewujudkan sasaran terwujudnya pemenuhan HAM didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Hubungan Industrial. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.5.916.229.740,- dengan realiasi sebesar Rp. 5.125.438.736,- dengan serapan anggaran sebesar 87%.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator Capaian atas kepedulian HAM yaitu : Adanya komitmen pimpinan dalam kepedulian HAM di Kabupaten Badung dan kesadaran seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Badung pada Hak Asasi Manusia.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator Capaian atas kepedulian HAM yaitu : masih adanya segelintir elemen yang kurang paham dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui: Sinergitas semua elemen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian HAM di wilayah Kabupaten Badung.

### Analisis Kinerja Sasaran 7: Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya

**K**ebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal). Bentuk lain dari kata budaya dalam bahasa inggris disebut *culture*. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan palaratan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan.



Kabupaten Badung yang merupakan bagian dari Provinsi Bali memiliki kebudayaan yang adiluhung bersifat local genius sehingga perlu dilestarikan. Di era globalisasi dewasa ini kebudayaan lokal (kearifan lokal) sangat dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap eksistensi budaya tersebut. Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan wisata, sehingga secara langsung akan beradapan dengan budaya asing. Demikian juga dengan perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak langsung terhadap eksistensi kebudayaan masyarakat Kabupaten Badung.

Penetapan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas/harmonis antara pelaksanaan pembangunan dengan lestarnya budaya, seperti pengembangan pariwisata dipadukan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diukur dengan formula Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2 (dua).

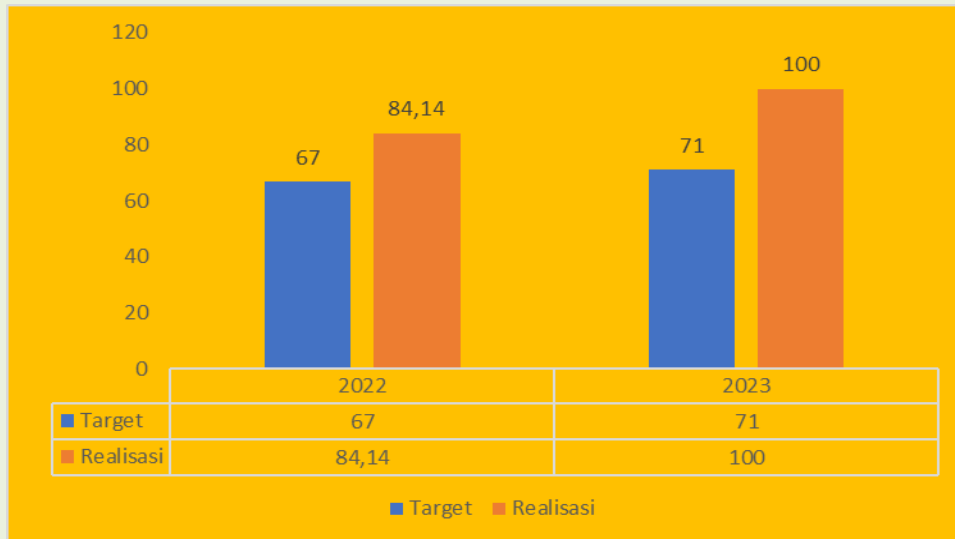
Hasil capaian sasaran strategis Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya dengan indikator persentase pertumbuhan seni dan budaya tahun 2023 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 71% dengan capaian kinerja sebesar 141% melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 84,14% dari target yang ditetapkan sebesar 67% sehingga capaian kinerja sebesar 125,58% melebihi target yang ditentukan pada RPJMD. Berikut target dan realisasi capaian sasaran strategis Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya tahun 2022-2023 seperti pada grafik berikut:





Grafik 3.14

Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya Tahun 2022-2023



Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2023

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya ditinjau dari kategori tingkat kemajuan desa adat menunjukkan bahwa semua desa adat (124 desa adat) di Kabupaten Badung termasuk kategori desa adat maju.

Sedangkan berdasarkan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung menunjukkan dari 108 cagar budaya yang ada 24 dalam kategori lestari. Secara Kategori desa adat dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Tabel 3.6

Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH	JML DESA ADAT		JUMLAH	JML. CAGAR
		DESA ADAT	BERKEMBANG	MAJU	CAGAR BUDAYA	BUDAYA LESTARI
1	Petang	27	27	27	23	5
2	Abiansemal	35	35	35	30	5
3	Mengwi	39	39	39	31	8
4	Kuta Utara	8	8	8	9	1
5	Kuta	6	6	6	10	-
6	Kuta Selatan	9	9	9	5	5
	<b>Kabupaten</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>108</b>	<b>24</b>

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2023



Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Dalam organisasi subak, dikenal adanya beberapa perangkat. Perangkat-perangkat yang ada dalam subak adalah pekaseh (ketua subak), petajuh (wakil pekaseh), penyarikan (juru tulis), petengen (juru raksa), kasinoman (kurir), dan beberapa yang lainnya. Subak merupakan salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.

Keberadaan subak di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa seluruhnya termasuk dalam kategori lestari atau dari 214 kelompok tani semuanya (100%) lestari. Sedangkan menurut komponen jumlah sekaa/kelompok tari, tabuh dan Kidung/Kekawin telah mendapatkan pembinaan, dari 2.063 sekaa/kelompok yang aktif sebanyak 2.063 sekaa atau 100%. Secara Lengkap jumlah subak dan sekaa/kelompok seni menurut kecamatan di Kabupaten Badung, seperti tabel berikut:

Tabel 3.7  
Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang  
di Kabupaten Badung Tahun 2023

No.	KECAMATAN	JUMLAH SUBAK	JUMLAH SUBAK LESTARI	JUMLAH SEKAA YANG ADA			JUMLAH SEKAA YANG AKTIF		
				TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN	TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN
1	Petang	43	43	24	72	13	24	72	13
2	Abiansemal	52	52	120	350	108	120	350	108
3	Mengwi	66	66	107	431	310	107	431	310
4	Kuta Utara	19	19	71	67	40	71	67	40
5	Kuta	7	7	19	33	11	19	33	11
6	Kuta Selatan	27	27	36	192	59	36	192	59
	<b>Kabupaten</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>377</b>	<b>1145</b>	<b>541</b>	<b>377</b>	<b>1145</b>	<b>541</b>

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya didukung oleh 11 program. Program pendukung meliputi: program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman, Program Pemberdayaan Masyarakatan Desa dan Kelurahan yang diampu oleh masing-masing kecamatan di



Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 296.879.469.532,- dengan realisasi sebesar Rp.272.649.751.952,- dengan serapan anggaran sebesar 92%.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian target Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya meliputi: Adanya Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar, Peningkatan Sumber Daya Manusia, sehingga tercipta SDM yang handal dan unggul, meningkatnya komitmen pemerintah terhadap eksistensi budaya, adat dan seni, meningkatnya eksistensi adat masyarakat, menguatnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat, meningkatnya pelestarian seni dan warisan budaya melakukan inventarisasi, Subak di Bali pada umumnya merupakan kelembagaan sosioagraris-religius di sektor pertanian, tetapi sangat menarik sebagai daya tarik wisata dari beragam atraksi yang bisa dikembangkan seperti lanskap persawahan, ritual agama, produk pertanian, dan kehidupan sosial petaninya serta sosialisasi terhadap situs budaya daerah serta pelestarian warisan budaya daerah.

Terdapat faktor penghambat terhadap keberhasilan Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya antara lain : Pengaruh digitalisasi yang menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat mampu menerapkan kesenian, budaya, dan adat dengan baik.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk terus meningkatkan indikator ini meliputi :

- a. Pemberian bantuan kepada desa adat dalam pelaksanaan upacara yadnya pemberian bantuan kepada lembaga adat, lembaga kesenian, dan pelaku seni.
- b. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada desa adat dan lembaga kesenian dengan crosscutting program dengan OPD lain dalam hal pelestarian adat, seni dan Budaya.
- c. Pemberian bantuan operasional terhadap subak di Kabupaten Badung
- d. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap seluruh subak yang ada di Kabuapten Badung.
- e. Adanya crosscutting program dengan OPD lainnya dalam hal pelestarian subak.



## Analisis Kinerja Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kategori nilai indeks pembangunan manusia dikategorikan menjadi 4 kelompok, meliputi :

- a. Sangat tinggi : IPM >80
- b. Tinggi :  $70 \leq \text{IPM} < 80$
- c. Sedang :  $60 \leq \text{IPM} < 70$
- d. Rendah : IPM <60

Hasil capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung tahun 2022 sebesar 82,13 dari target yang ditetapkan sebesar 81,6 sehingga kinerjanya sebesar 100,64%. Hasil capaian IPM tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan tahun 2022. Hasil capaian IPM sebesar 82,13 termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80).

Hasil capaian IPM pada tahun 2023 sebesar 83,08 dari target 81,61 sehingga capaian kinerja menjadi 102% melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa caoakaian kinerja tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 82,13 dan lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 81,83. Hasil capaian sasaran strategis





RPJMD meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti grafik berikut:

Grafik 3.15  
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Badung Tahun 2021-2023



Sumber data :Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Badung Tahun 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

- **Kesehatan**, diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
- **Pendidikan**, dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
- **Standar hidup layak**, dihitung dari produk nasional bruto per kapita

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencapaian indikator IPM tidak terlepas dari upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program untuk meningkatkan ketiga aspek indeks pembangunan manusia.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung oleh 7 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pagu anggaran yang



dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar Rp. 1.306.941.238.785,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.072.522.867.545,- dengan serapan anggaran sebesar 82%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia antara lain: Adanya Pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Badung yang sangat berkomitmen menangani kualitas pendidikan. Adanya keharmonisan antara pihak penyelenggara pendidikan, pelaku pendidikan dan orang tua didik atas kepeduliannya terhadap pendidikan pada keluarga masing-masing, dan mulai menyadari bahwa pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab guru tetapi orang tua juga mempunyai andil terhadap perkembangan pendidikan anak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat (*total coverage*) yang ditanggung pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS kesehatan, pelayanan kesehatan tambahan untuk penyakit yang diluar tanggungan BPJS, pembangunan gedung rumah sakit dan puskesmas rawat inap, peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan ruang kelas belajar, pendidikan formal dan non formal paket A,B dan C serta peningkatan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan pariwisata.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dari aspek kesehatan melalui: Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan, meningkatkan pelayanan masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan mendukung kesempatan belajar hingga pendidikan menengah, peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pendirian puskesmas dan rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak.



## Analisis Kinerja Sasaran 9: Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat

**K**operasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
2. Pengelolaan yang demokratis,
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi,
4. Kebebasan dan otonomi,
5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Kemandirian
5. Pendidikan perkoperasian
6. Kerjasama antar koperasi

Jenis Koperasi Menurut Fungsinya :

- Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya



melakukan pemasaran bersama. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

- Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Koperasi yang sehat ditandai dengan adanya Rapat Anggota Tahunan yang masih berjalan. Koperasi itu harus beroperasi setidaknya satu tahun buku. Aspek permodalan koperasi juga harus menunjukkan aktivitas produktif. Keberadaan koperasi khususnya di Kabupaten Badung masih mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, sehingga untuk dapat mengawasi jalannya koperasi di Kabupaten Badung dirumuskan sasaran strategis meningkatnya persentase koperasi sehat pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan indikator persentase jumlah koperasi sehat.

Capaian sasaran strategis meningkatnya persentase koperasi sehat dengan indikator persentase jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung Tahun 2023 sebesar 24,38% dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 7% hal ini membuat capaian kinerja pada tahun 2023 jauh melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 indikator persentase jumlah koperasi sehat sebesar 21,25% dari target 6%. Berikut grafik target dan capaian indikator persentase koperasi sehat tahun 2022-2023:





Grafik 3.16

Target dan capaian indikator persentase koperasi sehat tahun 2022-2023



Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Badung Tahun 2023

Keberadaan koperasi sehat hampir menyeluruh di setiap kecamatan Kabupaten Badung. Jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung Tahun 2023 sebanyak 39 koperasi, dengan rincian per kecamatan sesuai pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Koperasi Sehat Per-Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	KECAMATAN	KOPERASI SEHAT
1	PETANG	1
2	ABIANSEMAL	9
3	MENGWI	13
4	KUTA UTARA	8
5	KUTA	1
6	KUTA SELATAN	7
	<b>KABUPATEN</b>	<b>39</b>

Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Badung Tahun 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya persentase koperasi sehat dengan indikator persentase jumlah koperasi sehat didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan



dan Perlindungan Koperasi. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya persentase koperasi sehat sebesar Rp. 993.027.157 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 921.338.620,- dengan serapan anggaran sebesar 93%.

Tim Penilai Koperasi Sehat di Kabupaten Badung selalu berupaya mengoptimalkan kinerjanya dengan kegiatan evaluasi dan monitoring ke koperasi-koperasi di wilayah Kabupaten Badung. Berikut beberapa foto kegiatan monitoring dan evaluasi koperasi di Kabupaten Badung Tahun 2023 :

Gambar 3.9  
Monitoring dan Evaluasi Koperasi oleh Tim Penilai Koperasi Sehat  
Kabupaten Badung Tahun 2023



Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Badung Tahun 2023

Faktor pendorong meningkatnya persentase koperasi sehat antara lain: adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Badung, Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi digunakan untuk mengukur kinerja koperasi secara keseluruhan sehingga dapat menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas dan akurat, Adanya pendampingan dari akademisi dan praktisi yang ahli dibidangnya dalam pembinaan dan pendampingan koperasi.

Faktor pengambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya persentase koperasi sehat antara lain : Masih adanya Koperasi yang tidak kooperatif dalam mengisi dan mengembalikan kuisisioner yang diberikan oleh dinas dalam melaksanakan penilaian kesehatan koperasi, Masih ada Koperasi yang belum menerapkan laporan keuangan koperasi sesuai standar, kurang Konsistennya koperasi dalam melaksanakan RAT



(Rapat Anggota Tahunan) secara teratur, Kurangnya tindak lanjut oleh koperasi yang telah mendapatkan pendampingan dan belum maksimalnya gerakan koperasi untuk memenuhi legalitas usahanya sesuai permenkop 8 tahun 2023.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase koperasi sehat yaitu Melakukan jemput bola kepada koperasi yang belum memiliki izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam, Melakukan validasi data baik secara *online* maupun *offline* dan Melakukan konsolidasi internal dan koordinasi di Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi dengan para praktisi Koperasi seperti Dekopinda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

### Analisis Kinerja Sasaran 10: Meningkatnya Jumlah Wirausaha

**W**irausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu 'wira' dan 'usaha'. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan, usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Jika diartikan secara harfiah, maka makna dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Secara umum, definisi wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri dengan kondisi seluruh sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha (wirausahawan) dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur permodalannya. Tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dibandingkan saat sebelum diolah.





Tujuan utama dari wirausaha tentu saja adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ternyata masih ada beberapa tujuan lainnya, antara lain:

- Untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah.
- Untuk mendorong semangat atau mensosialisasikan pengaruh wirausaha kepada orang lain.
- Untuk membantu membangun karakteristik wirausaha yang baik dan kompeten.
- Untuk menghasilkan banyak wirausaha yang berkualitas.
- Untuk membantu membangun kesejahteraan masyarakat.

Beberapa waktu belakangan, pemerintah menganjurkan pada masyarakat untuk coba memulai profesi sebagai wirausaha. Hal ini dilakukan bukannya tanpa alasan, wirausaha adalah salah satu faktor yang mampu mendorong perekonomian negara, terutama di masa *new normal* seperti sekarang ini. Bukan hanya sebagai pendorong perekonomian negara, wirausaha adalah faktor yang membantu menurunkan angka pengangguran dengan membuka peluang kerja dari sektor UMKM. Lantaran itulah banyak jalan dibuka oleh pemerintah untuk membantu perkembangan dan kemandirian wirausaha, antara lain dengan mempermudah pembuatan surat izin usaha, pemberian pinjaman modal untuk usaha kecil dan menengah, sampai pada membantu pemasaran produknya.

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan jumlah wirausaha, dirumuskanlah sasaran strategis Meningkatkan Jumlah Wirausaha dengan indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 agar Pemerintah Kabupaten Badung dapat melihat perkembangan wirausaha khususnya di Kabupaten Badung.

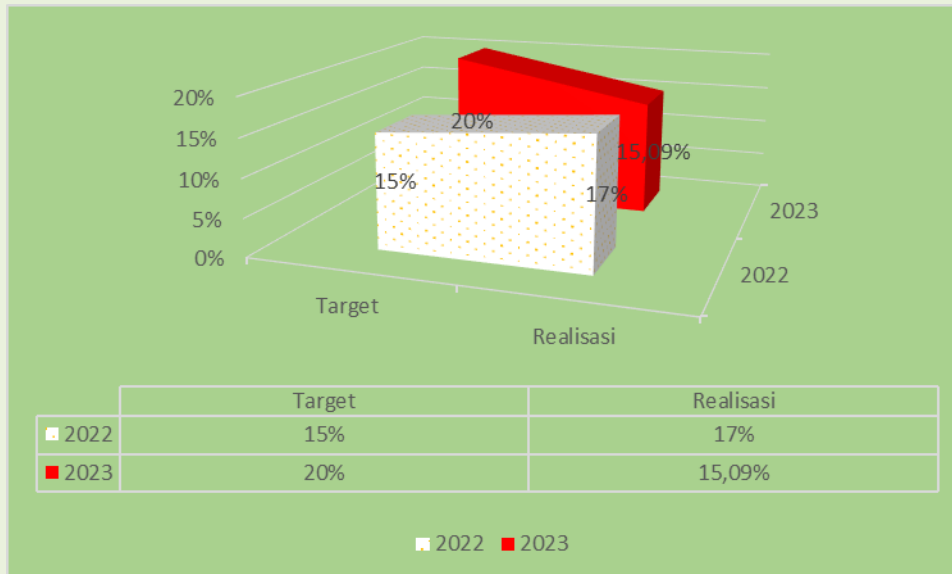
Capaian sasaran strategis meningkatnya jumlah wirausaha Tahun 2023 di Kabupaten Badung sebesar 15,09% dari target 20% sedangkan pada Tahun 2022 meningkatnya jumlah wirausaha di Kabupaten Badung sebesar 17% dari target 15% sehingga capaian kinerjanya 113,33% melebihi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah wirausaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Berikut target dan capaian sasaran meningkatnya jumlah wirausaha tahun 2022-2023 dalam grafik :





Grafik 3.17

Target dan Capaian Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023



Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Kab. Badung Tahun 2023

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan khususnya di Kabupaten Badung, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Berkembangnya UMKM di Kabupaten Badung merupakan bukti meningkatnya jumlah wirausaha. Karena dengan semakin banyaknya UMKM diharapkan mampu meningkatkan penghasilan dan mengurangi angka pengangguran karena semakin banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia. Jumlah UMKM maju di Kabupaten Badung sebanyak 8.909 dengan rincian per kecamatan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9  
Jumlah UMKM maju di Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM	
		ADA	MAJU
1	PETANG	1.180	944
2	ABIANSEMAL	3.255	2.767
3	MENGWI	5.185	4.408
4	KUTA UTARA	6.751	6.548



NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM	
		ADA	MAJU
5	KUTA	5.417	4.876
6	KUTA SELATAN	5.374	5.159
TOTAL KABUPATEN BADUNG		<b>27.162</b>	<b>24.702</b>

Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Tahun 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah wirausaha dengan indikator persentase pertumbuhan jumlah wirausaha didukung oleh 3 program. Program pendukung meliputi: Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya jumlah wirausaha sebesar Rp. 19.591.999.322,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.579.526.449,- dengan serapan anggaran sebesar 85%.

Faktor pendorong meningkatnya jumlah wirausaha antara lain: adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Kabupaten Badung, dukungan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat ,daerah maupun pihak swasta sangat besar terhadap proses perkembangan UMKM baik itu dalam hal bantuan permodalan,pemasaran,dan promosi produk UMKM, Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Fasilitas publik wajib menyediakan pojok UMKM untuk medisplay dan mempromosikan produk UMKM.

Faktor pengambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya jumlah wirausaha yaitu UMKM Belum menerapkan proses digitalisasi keuangan sehingga sering terjadi keuangan perusahaan belum terpisah dengan keuangan rumah tangga sehingga mempersulit menghitung omset penjualan /keuntungan dan masih minimnya pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah wirausaha yaitu Program kemitraan dengan perusahaan besar/toko modern untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk UMKM, Program Pameran Badung UMKM Week adalah bentuk dukungan pemerintah melalui pameran yang dilaksanakan di Mall /Pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk UMKM agar dikenal lebih luas baik ditingkat domestik maupun mancanegara, Program Sosialisasi Kemudahan perizinan usaha mikro, Program Pendampingan kepada UMKM dengan melibatkan



tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk meningkatkan dan pengembangan UMKM dan Melakukan konsolidasi internal dan koordinasi di Bidang pengembangan UMKM dengan para praktisi Koperasi seperti Dekopinda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

## Analisis Kinerja Sasaran II: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

**K**emajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat yang dapat dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah tingkat pendapatan masyarakat yang diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat. Semakin besar jumlah nilai PDRB maka semakin besar pendapatan masyarakat daerah dan digunakan untuk proses pembangunan dan pengembangan daerah tersebut.

Produk Domestik Bruto pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dan Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal.

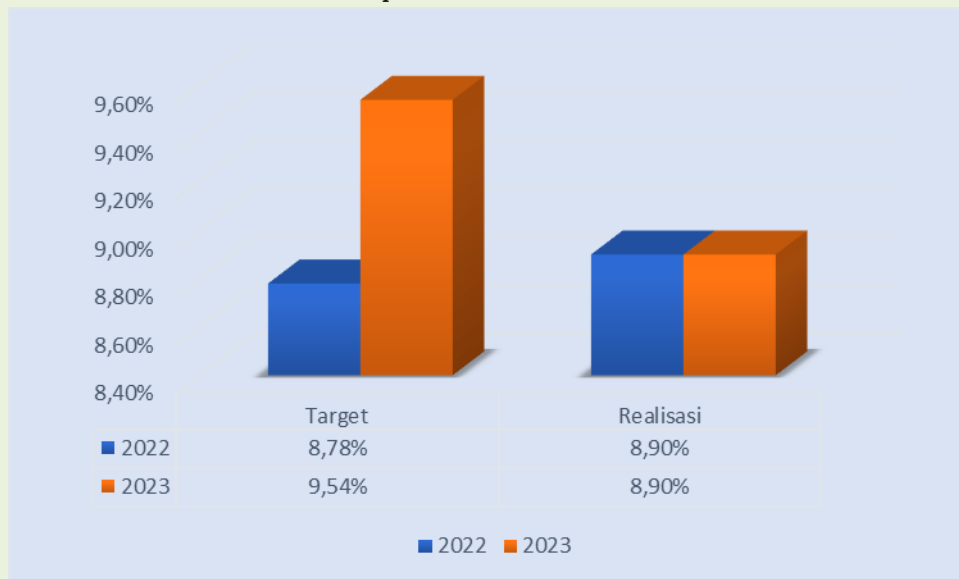
Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan



tingkat pendapatan salah satunya melalui sektor perdagangan. Sehingga dirumuskan sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Capaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 8,9% dari target 9,54% sehingga capaian kinerjanya menjadi 93%. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar 8,9% dari target 8,78% sehingga capaian kinerjanya menjadi 101,36% melebihi target yang ditentukan. Berikut target dan capaian meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022-2023 di dalam grafik:

Grafik 3.18  
Target dan capaian meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022-2023



Sumber data : Dinas Koperasi UMKM Tahun 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan , Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting , Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri





.Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar Rp. 1.658.659.223,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.448.083.779,- dengan serapan anggaran sebesar 87%.

Faktor pendorong meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB antara lain: adanya komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan di Kabupaten Badung, Badung adalah daerah internasional (Daerah Tujuan Wisata Dunia) sehingga lebih mudah memasarkan dan menjual produk, memberikan edukasi untuk mengoptimalkan teknologi informasi dalam metode transaksi di sektor perdagangan, dan Kemudahan administrasi dalam proses penerbitan ijin perusahaan di Kabupaten Badung.

Faktor pengambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yaitu dilapangan banyak produk-produk daerah luar seperti dari Pulau Jawa yang masuk ke Kabupaten Badung, karena di luar Kabupaten, pengurusan PIRT dipermudah (PIRT adalah syarat bagi produk untuk masuk ke pasar jejaring modern.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yaitu Pihak Dinas juga melakukan verifikasi biaya perkiraan revitalisasi pasar yang diajukan oleh pihak desa sehingga diperoleh angka yang lebih realistis, tujuannya adalah efisiensi penggunaan anggaran sebaik mungkin.

### Analisis Kinerja Sasaran 12 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yaitu : kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*Affect*) dan makna hidup (*Eudaimonia*) dengan skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai indeks, maka penduduk semakin tidak bahagia. Beberapa variabel utama, dalam menentukan Indeks Kebahagiaan antara lain : Kepuasan terhadap kondisi kesehatan, Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, Kepuasan

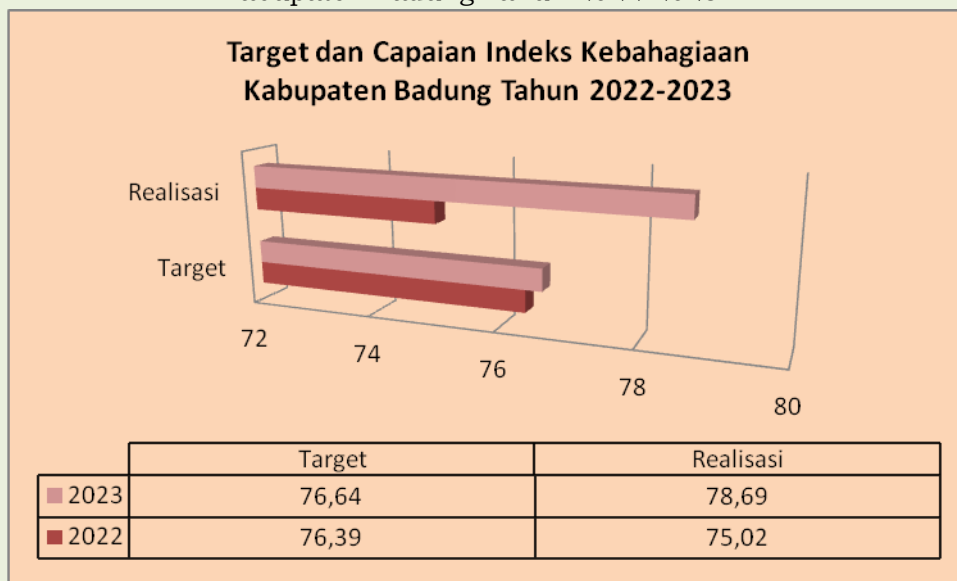


terhadap kondisi keamanan, Kepuasan terhadap hubungan sosial, Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, Kepuasan terhadap kondisi rumah, Kebahagiaan hidup, Harapan/keinginan yang sudah tercapai, Kepuasan hidup, Kepuasan terhadap kondisi lingkungan, Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.

Pengukuran sasaran meningkatkan kebahagiaan masyarakat diukur dengan indikator indeks kebahagiaan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 78,69 dari target 76,64 dengan capaian kinerja melebihi target yaitu 103%. Sedanglam pada tahun 2021 tidak dilaksanakan oleh karena adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19 dan Tahun 2022 diperoleh indeks kebahagiaan sebesar 75,02 dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 76,39.

Sebagai perbandingan hasil pengukuran indikator Indeks kebahagiaan tahun 2022-2023 secara lengkap target dan capaian indikator indeks kebahagiaan Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.19  
Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan  
Kabupaten Badung Tahun 2022-2023



Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat didukung oleh 6 program. Program pendukung meliputi: Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks),



Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 11.861.971.751,- dengan realiasi sebesar Rp. 9.761.853.098,- dengan serapan anggaran sebesar 82%.

Faktor Pendorong pencapaian sasaran ini yaitu adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Badung dengan mengalokasikan pagu anggaran agar dapat mendukung pemberian layanan kepada masyarakat.

### **Analisis Kinerja Sasaran 13 : Menurunnya angka kemiskinan**

**K**emiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan bukan saja akibat masalah fisik atau rumah semata-mata, namun dipengaruhi faktor kemudahan akses dan mentalitas.

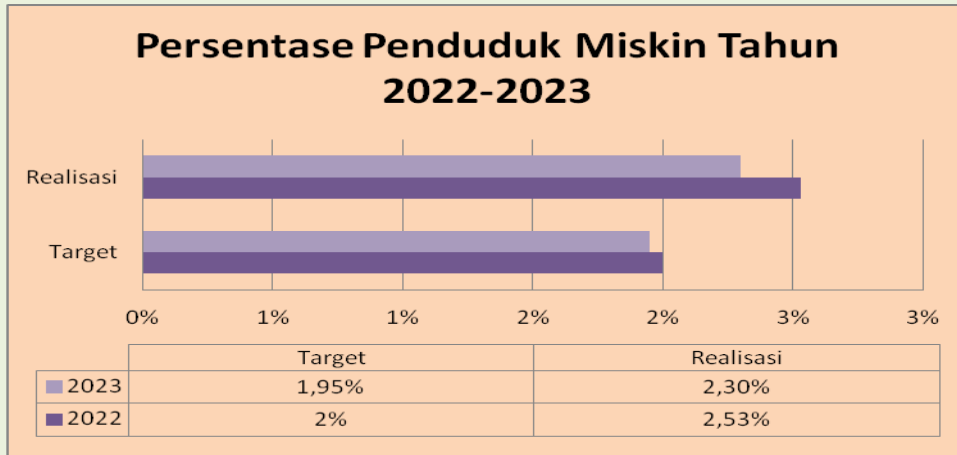
Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius dalam pengetasan kemiskinan sebagai upaya untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen maka sasaran strategis RPJMD salah satunya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dengan formula jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk kali 100.

Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2023 sebesar 2,30% dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 1,95% dengan capaian kinerja masih belum mencapai target yaitu -118%. Sedangkan pada tahun 2022 indikator persentase penduduk miskin sebesar 2,53% dari target sebesar 2% berarti capaian kinerjanya sebesar -126,5% yang artinya belum mencapai target yang ditetapkan. Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2023 lebih rendah capaiannya dibandingkan tahun 2022. Secara lengkap target dan realisasi indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung tahun 2022-2023 seperti grafik berikut :



Grafik 3.20

Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2022-2023



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2023

Data jumlah dan persentase penduduk tergolong miskin di Kabupaten Badung pada tahun 2023 masih terkendali 2,30%, menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin urutan nomor 9 wilayah Provinsi Bali. Adapun rincian perbandingan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali periode Tahun 2023 seperti grafik berikut :

Grafik 3.21

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2023





Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program-program strategis dalam penanganan kemiskinan. Program tersebut dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial.

Upaya untuk mewujudkan sasaran menurunnya angka kemiskinan didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.449.146.071,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.490.174.628,- dengan serapan anggaran sebesar 85%.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini yaitu Kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Badung meskipun di masa Pandemi Covid-19 tetap menjadi daya tarik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Gepeng dan PSK untuk melakukan aktivitasnya di Kabupaten Badung, hal ini mengakibatkan Kabupaten Badung belum bisa terbebas dari gelandangan, pengemis serta PSK dan Belum maksimalnya pemulihan ekonomi akibat pandemi sehingga memerlukan berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator ini yaitu Komitmen Pimpinan dalam hal ini Bupati Badung beserta jajarannya untuk selalu melaksanakan program/kegiatan pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Badung yang cukup masif, khususnya di sektor Pariwisata dan Meningkatnya kesadaran dan peran serta dunia usaha dalam program Corporate Social Responsibility ( CSR ).

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Badung melalui : Memperluas akses kesejahteraan sosial, Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial, Mengoptimalkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, Memberikan Bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai social safety net sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.



### **Analisis Kinerja Sasaran 14 : Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian**

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini, termasuk keberadaan DTW (Daya Tarik Wisata) turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat dilihat dari total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung sepanjang Tahun 2023 sebanyak 7.298.643 terdiri atas 2.212.789 kunjungan wisatawan mancanegara dan 1.573.429 kunjungan wisatawan domestik. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2,455,998 terdiri atas 882,569 kunjungan wisata mancanegara dan 1,573,429 kunjungan wisata domestik. Berdasarkan data tersebut bahwa pada tahun 2023 total kunjungan wisatawan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Kondisi geografis Kabupaten Badung yang memiliki dataran rendah berupa kawasan pantai kemudian dataran tinggi yang di dominasi oleh wilayah pertanian khususnya Badung bagian utara. Dengan total luas lahan pertanian kurang lebih 20.283 Hektar, hal ini menjadi potensi wisata dimana Kabupaten Badung gencar dalam pembangunan desa wisata dan wisata berbasis agro.

Hasil capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2023 sebesar 5,12% dari target 5,12% yang artinya capaian kinerja tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian sebesar 2,56% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2022-2023 secara lengkap dapat dilihat grafik dibawah ini



Grafik 3.22

Capaian indikator Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2022-2023



Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program Perumahan dan Pembangunan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.510.803.879,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.019.737.573,- dengan serapan anggaran sebesar 88%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran ini yaitu Kondisi Kabupaten Badung yang kondusif menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Badung, Adanya koordinasi/kerja sama yang baik antara Dinas Pariwisata dengan Stakeholder pariwisata dalam menjalankan berbagai program kepariwisataan yang telah direncanakan, Adanya berbagai ragam daya tarik wisata baik dalam budaya dan buatan, Adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung. Sedangkan factor penghambat dalam pencapaian sasaran ini



yaitu belum optimalnya pengembangan desa wisata yang merupakan pariwisata yang berbasis masyarakat (*Based community Tourism*).

### **Analisis Kinerja Sasaran 15 : Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam**

Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2023. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2023 salah satu diantaranya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata.

Strategi yang tengah dilakukan oleh Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam yakni Meningkatkan Jumlah pelaku dan produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam dan Peningkatan Pengendalian Sumber - Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup.

Hasil capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2023 sebesar 49,08% dari target yang ditetapkan sebesar 31,67% yang artinya capaian kinerja melebihi target yaitu 155%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam sebesar 43,33% dan telah melampaui target telah ditetapkan yakni sebesar 31,37% dengan capaian kinerja 138,12%. Adapun capaian sasaran Meningkatkan Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2022-2023 secara lengkap dapat dilihat grafik dibawah ini :





Grafik 3.23

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2022-2023



Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam didukung oleh 3 program. Program pendukung meliputi: program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 43.073.210.941,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.257.529.753,- dengan serapan anggaran sebesar 89%.

Faktor Pendorong dalam pencapaian sasaran ini yaitu Memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap kegiatan pembinaan dan pelatihan serta pentingnya langkah perbaikan yang dilakukan oleh IKM (Industri Kecil Menengah) dan Koordinasi internal yang baik dengan EO maupun IKM (Industri Kecil Menengah) yang akan dilibatkan pada kegiatan pameran. Sedangkan factor penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran dari pelaku IKM untuk mendaftarkan usahanya pada SIINAS.



## Analisis Kinerja Sasaran 16 : Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan kualitas produk pertanian dan perikanan yang baik, hal ini terlihat dalam RPJMD 2021-2026 dengan perumusan sasaran strategis Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas Produk Pertanian.

### Indikator 1 : Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja.

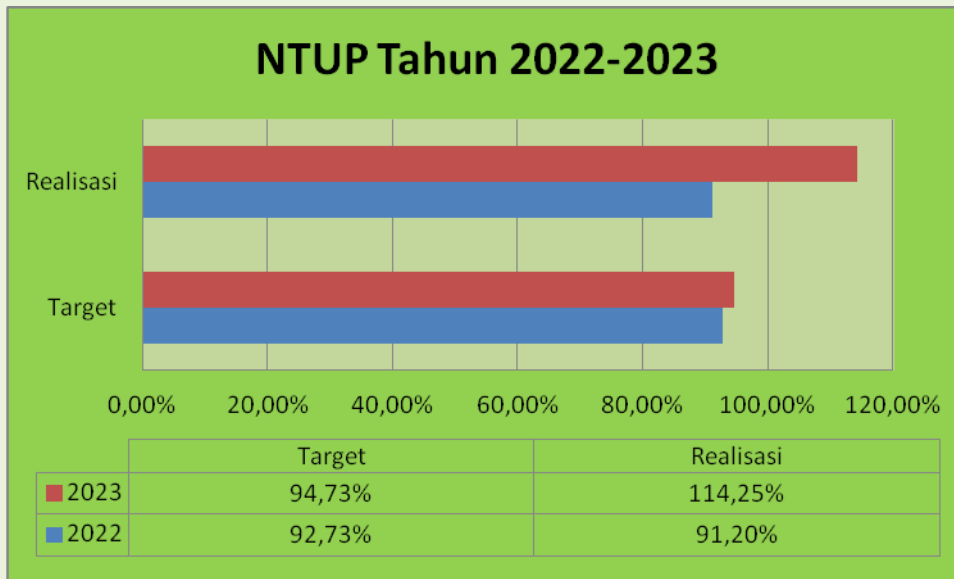
Sebagai wujud dukungan pemerintah dalam mempertahankan aktivitas sektor pertanian, maka Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk selalu memberikan perhatian bagi kebutuhan dasar para petani. Salah satu diantaranya adalah pemberian subsidi pupuk kepada para petani, selain untuk meringankan beban pengeluaran bagi para petani hal ini juga untuk mendorong peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Sehingga dirumuskan indikator Nilai Tukar Usaha Petani dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Hasil capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada sasaran Meningkatkan Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian tahun 2023 sebesar 114,25% dari target yang ditetapkan sebesar 94,73% dengan capaian kinerja melebihi target yaitu 121%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) sebesar 91,2% atas target yang telah ditetapkan yakni sebesar 92,73% dengan capaian kinerja 98,35%. Adapun capaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat grafik dibawah ini :



Grafik 3.24

Capaian Indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Tahun 2022-2023



Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

Upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 41.461.709.895,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.287.156.157,- dengan serapan anggaran sebesar 95%.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, keingintahuan masyarakat tentang peningkatan gizi sangat tinggi dan Badung mempunyai keaneka ragam pangan yang melimpah

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) meliputi : Luas lahan pertanian yang semakin menyusut, Kesuburan lahan yang semakin berkurang, Rata-rata umur petani sawah diatas 50 tahun (kurang produktif), Penanganan Pasca panen yang kurang memadai, Adanya aturan PDN yang



menyebabkan serapan anggaran kecil (vaksin hewan), Minat kelompok tani untuk memperpanjang sertifikat dan registrasi rendah dan Kurangnya dukungan sebagian kelompok aspirasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman.

Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian indikator ini meliputi :

1. Intervensi di peningkatan provitas di setiap musim tanam
2. Pengecekan pH, pola tanam dan perlakuan pupuk berimbang spesifikasi lokasi
3. Pendampingan penerapan budidaya secara intens
4. Pelatihan, monitoring dan penerapan teknologi mekanisasi
5. Mensosialisasikan kepada poktan pentingnya registrasi dan sertifikasi produk serta mengusulkan kegiatan di APBD Kabupaten dan Pemerintah Provinsi
6. Memastikan terhadap kelompok aspirasi yang mendapat alokasi kegiatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada jika tidak ada akan dicarikan lokasi yang lain.

## Indikator 2 : Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan dinyatakan dalam persentase. Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap keberadaan nelayan di wilayahnya, hal ini diwujudkan dengan dikembangkan nya aplikasi Fish Go oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Dimana dengan aplikasi ini nelayan dapat mengetahui posisi ikan berkumpul, sehingga nelayan dapat melakukan efisiensi bahan bakar karna pergerakan kapal nelayan menjadi lebih tepat sasaran. Dan yang paling penting adalah jumlah tangkapan nelayan menjadi meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

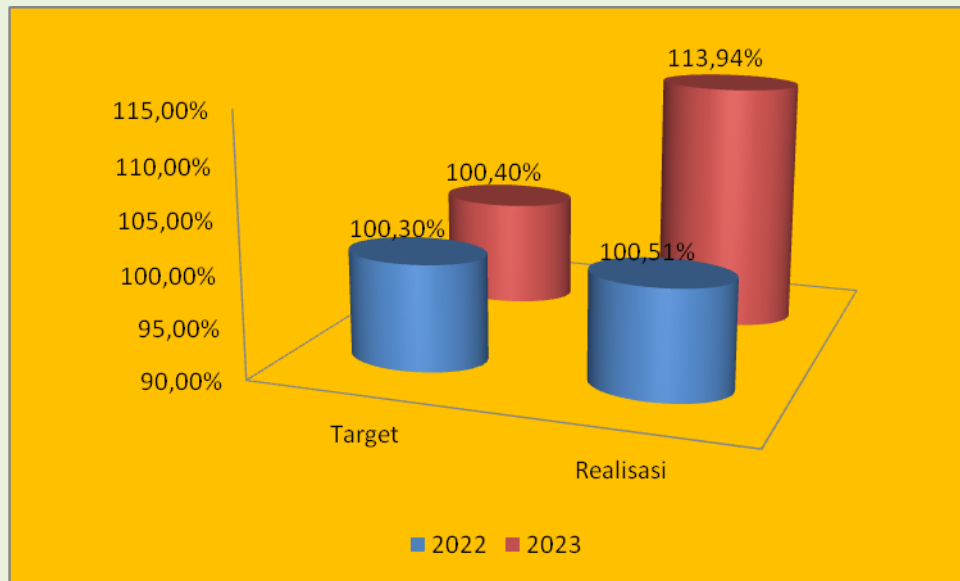
Hasil capaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada sasaran Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian tahun 2023 sebesar 113,94% dari target yang ditetapkan sebesar 100,40% dengan capaian kinerja melebihi target yaitu 113%. Sedangkan pada tahun 2022 indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,51% dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100,3% dengan capaian kinerja 100,2%. Adapun capaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2022-2023 secara lengkap dapat dilihat grafik dibawah ini :





Grafik 3.25

Capaian Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2022-2023



Sumber data : Dinas Perikanan Tahun 2023

Upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) didukung oleh 4 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.657.590.371,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.334.891.432,- dengan serapan anggaran sebesar 93%.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) meliputi : Support dan bimbingan pimpinan serta koordinasi dengan instansi pengampu dinas dalam penyelesaian masalah, peluang pasar untuk produk hasil perikanan budidaya yang cukup besar khususnya untuk jenis ikan lele dan nila, Pendampingan tenaga penyuluh perikanan dan sarana dan prasarana yang tersedia memadai dan Responsip Nelayan dan Pembudidaya Ikan sangat baik.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini yaitu : Terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur pada Dinas Perikanan sehingga mengalami keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Terbatasnya kualitas SDM



Pembudidaya Ikan dalam penguasaan dan penerapan teknologi budidaya perikanan dan Fluktuasi harga pakan ikan yang cukup tinggi.

Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) meliputi :

1. Kunjungan dan Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan
2. Rehabitasi Kolam perbenihan ikan air tawar
3. Hibah Sarana dan Prasarana kepada kelompok nelayan
4. Hibah Sarana dan Prasarana kepada kelompok pembudidaya ikan
5. Pendistribusian benih ikan air tawar

### **Analisis Kinerja Sasaran 17: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

**S**ektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dan motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Sektor Pariwisata merupakan sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Badung. Pada saat virus COVID-19, sepihnya pariwisata sangat berdampak di Provinsi Bali dan khususnya Kabupaten Badung. Oleh karena itu, sasaran meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB merupakan bentuk komitmen menjaga keberlangsungan sektor kepariwisataan.

Destinasi wisata di Kabupaten Badung merupakan salah satu tujuan utama wisatawan baik domestik atau mancanegara. Berikut jumlah data kunjungan wisawatan Tahun 2021-2023 dan jumlah usaha sarana pariwisata per kecamatan di Kabupaten Badung :



Tabel 3.10

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021-2023

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN	
		Domestik	M mancanegara
1	2021	128.242	276
2	2022	1.573.429	882.569
3	2023	1.911.765	5.386.878

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2021-2023

Tabel 3.11

Jumlah usaha sarana pariwisata per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH USAHA SARANA PARIWISATA			
		RESTORAN	RUMAH MAKAN	BAR	CATERING
1	PETANG	3	23	-	-
2	ABIANSEMAL	5	109	-	4
3	MENGWI	80	73	15	3
4	KUTA UTARA	288	90	59	21
5	KUTA	282	114	47	9
6	KUTA SELATAN	171	94	16	11
<b>TOTAL KABUPATEN BADUNG</b>		<b>830</b>	<b>503</b>	<b>137</b>	<b>48</b>

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2023

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 24,67% dari target 25% dengan capaian kinerja 99% hampir memenuhi target.



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB didukung oleh 1 program. Program pendukung meliputi: Program Pemasaran pariwisata. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.567.851.547,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.648.455.981,- dengan serapan anggaran sebesar 75%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran ini yaitu Kondisi Kabupaten Badung yang kondusif menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Badung, Adanya koordinasi/kerja sama yang baik antara Dinas Pariwisata dengan Stakeholder pariwisata dalam menjalankan berbagai program kepariwisataan yang telah direncanakan, Adanya berbagai ragam daya tarik wisata baik dalam budaya dan buatan, Adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung. Sedangkan Faktor penghambat dalam pencapaian persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah Belum optimalnya pengembangan desa wisata yang merupakan pariwisata yang berbasis masyarakat (*Based community Tourism*)

Strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini meliputi: Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung , meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif , meningkatkan Pendapatan dari retribusi obyek wisata dan meningkatkan kualitas Industri Pariwisata .

### **Analisis Kinerja Sasaran 18: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan**

Indeks Kualitas lingkungan hidup merupakan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung terkait dengan Tiga indikator yaitu kualitas udara, air dan tutupan hutan. IKLH disusun berdasarkan basis data hasil pengamatan yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. IKLH menjadi hal yang sangat penting diketahui mengingat saat ini tantangan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan semakin berat dan kompleks.





IKLH berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kondisi lingkungan, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Badung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi indeks kualitas lingkungan hidup seperti berikut:

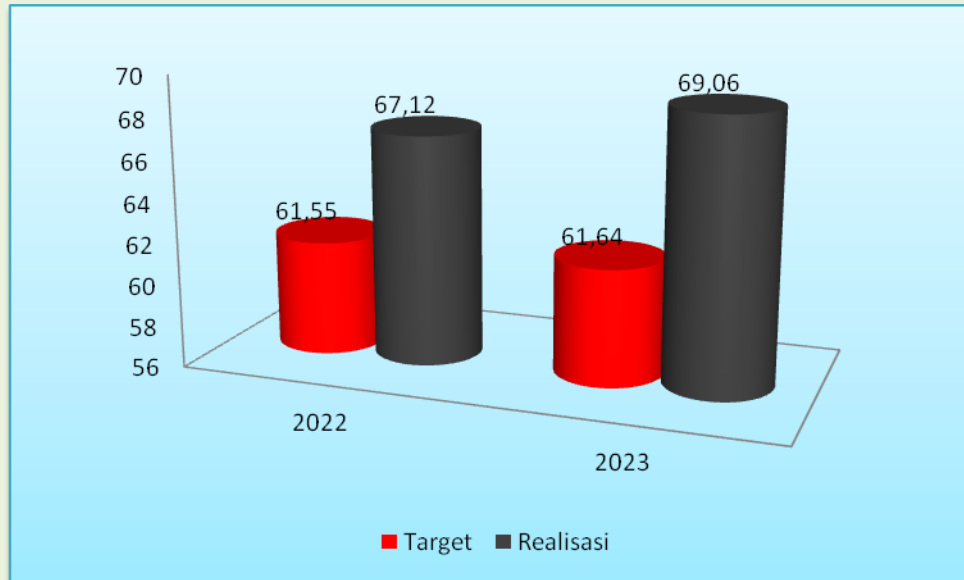
- 1) Sangat Baik : > 90
- 2) Baik : 70 - 90
- 3) Sedang : 50 - 70
- 4) Buruk : 25 - 50
- 5) Sangat Buruk : 0 - 25

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dengan indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 69,06 dari target yang ditetapkan sebesar 61,64 yang artinya melebihi capaian kinerja yaitu 112%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,12 dari target sebesar 61,55 sehingga capaian kinerjanya sebesar 109,04% melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hasil capaian indikator IKLH tahun 2023 termasuk kategori sedang karena nilainya berkisar antara 50 - 70. Gambaran target dan realisasi indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022-2023 seperti grafik berikut:



Grafik 3.26

Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung Tahun 2022-2023



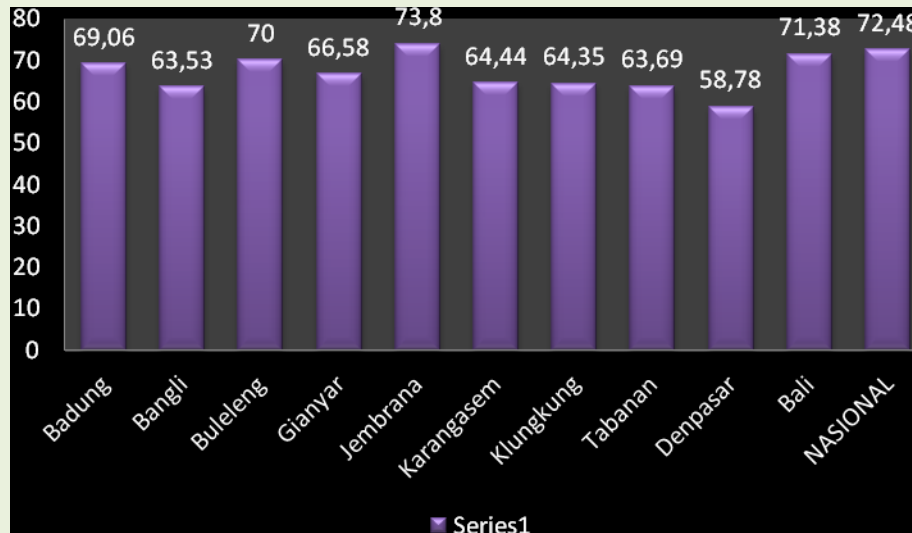
Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung, 2023

Berdasarkan variabel IKLH pada tahun 2023 menunjukkan capaian variabel Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) capaiannya meningkat. Nilai IKLH Kabupaten Badung didapatkan hasil sebesar 69,06 yang merupakan kategori SEDANG.

Distribusi hasil capaian indikator IKLH menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian IKLH tertinggi Kabupaten Jembrana sebesar 73,80 dan yang terendah Kota Denpasar sebesar 58,78. Untuk Kabupaten Badung pada peringkat ketiga terbaik dengan capaian sebesar 69,06 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 71,38 serta IKLH nasional sebesar 72,48. Perbandingan IKLH menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional seperti grafik berikut :



Grafik 3.27  
Perbandingan IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional  
Tahun 2023



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2023

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup didukung oleh 7 program. Program yang mendukung pencapaian sasaran ini meliputi: Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Limbah Beracun, Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengharagaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Persampahan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.124.175.717.009,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.015.927.131,- dengan serapan anggaran sebesar 89%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

1. Komitmen kepala daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan kebijakan pro environment dalam pembangunan di Kabupaten Badung.



2. Sudah memiliki tim KPA dengan syarat lengkap yang sudah berlesensi.
3. sudah memiliki staf teknis yang bersertifikat dalam menangani proses persetujuan lingkungan.
4. Sudah memiliki SOP disetiap kegiatan.
5. Dukungan dan peran serta dari seluruh warga sekolah baik berupa sarana maupun prasarana dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup.
6. Optimalnya tim pengurangan yang memberikan edukasi dan sosialisasi untuk pengelolaan sampah plastik di sekolah, desa dan pasar di Kabupaten Badung serta tertanganinya pengelolaan sampah dari sumbernya.
7. Efektifnya tim pendampingan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat sumber.
8. Optimalisasi TPS3R, TPST dan pengelolaan sampah di Rumah Tangga dengan penyediaan dana OP untuk TPS3R dan tersedianya DED Rumah kompos di TPST Mengwitani.
9. Beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA yang berkapasitas 10 ton/hari.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan IKLH di Kabupaten Badung adalah :

1. Banyak ditemui desa yang tidak memiliki data terkait kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan serta data pemulihan lingkungan padahal sesungguhnya mereka telah/pernah melaksanakan kegiatan dimaksud, namun tidak tercatat dan/atau tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini cukup menjadi hambatan ketika kita bermaksud menyerap informasi awal di desa bersangkutan.
2. Terdapat 124 usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persyaratan dan pemenuhan persyaratan pengelolaan Limbah B3 yaitu: memiliki dokumen lingkungan, memiliki ijin lingkungan, menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta pengelolaan Limbah B3 setiap 6 bulan, memiliki rincian teknis penyimpanan, memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yg memiliki ijin dari kementerian KLHK, memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3. Sampai saat ini baru 26 (17,3%) usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tempat penyimpanan dengan persyaratan sesuai peraturan pengelolaan Limbah B3.





3. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Badung, berdampak pula pada peningkatan volume sampah serta jenis sampah yang dihasilkan, salah satunya adalah sampah plastik. Untuk itu, maksud dari kegiatan Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung adalah agar tertanganinya sampah plastik di lokasi-lokasi tertentu, seperti : di sekolah, desa dan pasar di Kabupaten Badung.
4. Belum optimalnya program pemulihan terhadap sungai-sungai yang tercemar melalui berbagai program aksi, seperti prokasih (program kali bersih)
5. Belum dimanfaatkan sungai sebagai sarana pariwisata dan kegiatan ekonomi
6. Optimalisasi pengelolaan sampah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan diperlukan untuk mendukung kebersihan destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Badung.

Strategi yang ditempuh untuk lebih optimalnya peningkatan IKLH di Kabupaten Badung yaitu:

1. Mengendalikan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung
2. Mengurangi Daerah Rawan bencana dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
3. "Memprioritaskan cara pengelolaan persampahan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Badung"
4. Pemantauan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Badung
5. Membangun TPS 3R/TPA di tempat yang wilayah-wilayah desa/kelurahan yang sudah tersedia lahan
6. Membangun taman berkualitas internasional yang berwujud bersih dan hijau di Kabupaten Badung
7. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Melaksanakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).



## Analisis Kinerja Sasaran 19: Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Manfaat dengan adanya suatu inovasi antara lain :

1. Menciptakan Peluang, hadirnya inovasi bisa menjadi peluang bagi seluruh orang untuk berlomba-lomba menunjukkan kreativitasnya agar menghasilkan suatu inovasi yang visioner.
2. Meningkatkan Produktivitas, sebab akan lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat, sebelum ide-ide tersebut malah direbut orang lain.
3. Meningkatkan Kreativitas dan Percaya Diri, membuat sebuah inovasi mampu meningkatkan kreativitas serta mendorong rasa percaya diri yang tinggi. Sebab, sebuah inovasi bisa gagal jika seorang inovator malah ragu atas inovasi yang telah dibuatnya
4. Mampu Memecahkan Masalah, seorang inovator harus berpikir jernih agar bisa memecahkan masalah serta menemukan solusi terbaik agar inovasi yang diciptakan dapat berhasil
5. Bisa Meraih Kesuksesan, inovasi yang diciptakan menjadi salah satu jalan untuk meraih kesuksesan. Sebab, inovasi yang dibuat bisa menjadi kunci agar lebih sukses dari para pesaing lainnya, sehingga bisa mendapat cuan yang lebih besar dan mempercepat kesuksesan

Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen dalam meningkatkan inovasi daerah sehingga dirumuskan sasaran strategis meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya

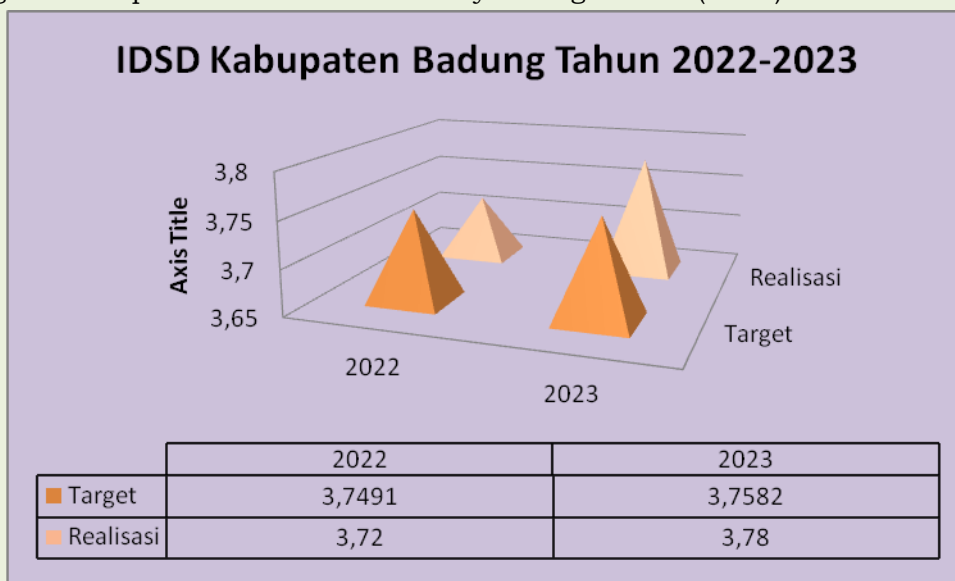


saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu dalam konteks kabupaten/kota sebagai sebuah organisasi, daya saing diartikan sebagai kemampuan kabupaten/kota untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Capaian sasaran strategis meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 sebesar 3,78 dari target 3.7582 sehingga capaian kinerja melebihi target yaitu 101%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,72 dari target 3,7491 sehingga capaiannya sebesar 99,22% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Target dan Capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2023 dalam grafik berikut :

Grafik 3.28

Target dan Capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2023



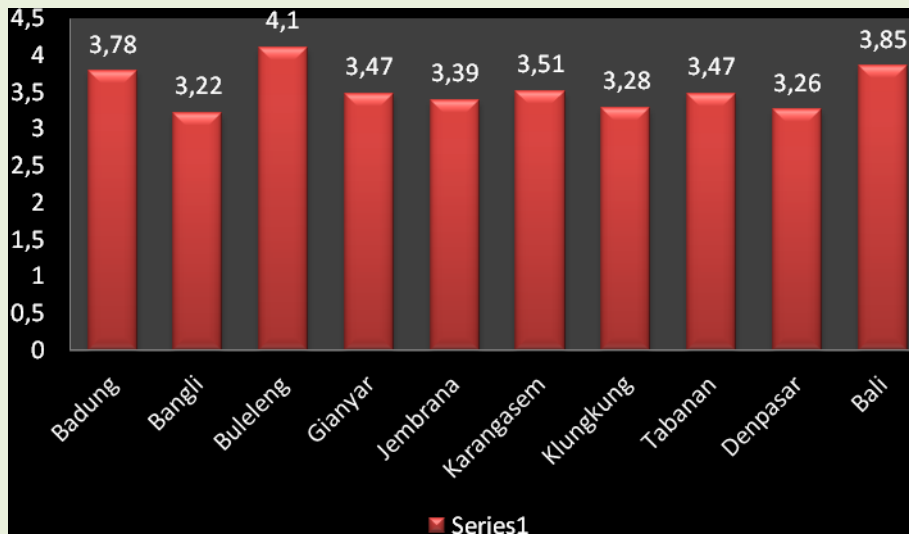
Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2022-2023

Pemerintah Kabupaten Badung menempati peringkat kedua untuk IDSD yaitu sebesar 3,78 dan peringkat pertama dengan nilai 4,10 yang ditempati oleh Kabupaten



Buleleng. Nilai terendah ada pada Kabupaten Bangli dengan nilai 3,22. Berikut perbandingan IDSD kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2023:

Grafik 3.29  
Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)  
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023



Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023

Upaya untuk meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 didukung oleh 21 program. Program pendukung meliputi: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Penunjang Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.601.035.762.579,- dengan realisasi sebesar Rp.1.184.659.054.047,- dengan serapan anggaran sebesar 74%.





Faktor Pendorong indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yaitu Adanya Komitmen bersama antara Kepala Daerah bersama Kepala Perangkat Daerah terkait Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah Keterbatasan Sumber Daya dan Kurangnya kolaborasi dan Komunikasi antar stakeholder terkait.

Upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan guna mendorong capaian sasaran strategis ini diantaranya :

1. Melaksanakan Sosialisasi Inovasi di Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Badung
2. Melaksanakan pendampingan Inovasi di 38 Perangkat Daerah di Kabupaten Badung
3. Adanya koordinasi dan pendampingan langsung terkait Indikator Inovasi di Perangkat Daerah oleh Tim Penguatan Inovasi Kabupaten Badung

### 3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “ *Money Follows Program*” yaitu perubahan paradigma pendekatan anggaran yang lebih focus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan money follows program, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (*money follows function*).

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2023 sebesar Rp. 6.583.329.971.972,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.961.656.893.759 sehingga persentase penyerapan sebesar 75%. Sedangkan pada tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 2.615.598.899.506,90 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.112.953.558.695,59 sehingga persentase penyerapan sebesar 90,35%. Sasaran strategis pada tahun 2023 didukung sebanyak 146 program. Alokasi dan realisasi



anggaran dari masing-masing program kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2023 seperti tabel berikut:

Tabel 3.13  
Sasaran Strategis, Jumlah Program, Pagu dan Realisasi Anggaran  
Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1	Indek kerukunan umat beragama	82 (Sangat Tinggi)	1	3,516,127,816	2,797,416,687	80
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	79,00 (BB)	5	7.631.895.606	4.866.311.807	64
		3.	Opini BPK	WTP	4	2.017.446.854.166	1.215.318.195.675	60
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2 (Baik)	8	253.029.474.518	227.801.941.958	90
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	57,65 (Sangat Rendah)	2	15.123.963.759	12.228.597.004	81
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 (Baik)	34	792.006.629.284	712.237.709.350	90
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00 %	7	9.800.637.994	7.684.934.396	78



	at Dalam Mentaati Perda dan Perkada							
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	75,00 (Peduli HAM)	8	5.916.229.740	5.125.438.736	87
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	71%	11	296.879.469.532	272.649.751.952	92
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	81,61 (Sangat Tinggi)	7	1.306.941.238.785	1.072.522.867.545	82
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	7,00%	5	993.027.157	921.338.620	93
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	20,00 %	3	19.591.999.322	16.579.526.449	85
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,54%	5	1.658.659.223	1.448.083.779	87
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	76,64	6	11.861.971.751	9.761.853.098	82
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	1,95%	4	6.449.146.071	5.490.174.628	85
14.	Meningkatnya pengembangan	16.	Persentase pengembangan daya	5,12%	4	12.510.803.879	11.019.737.573	88



	ngan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian		Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian						
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,67 %	3	43.073.210.941	38.257.529.753	89	
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	94,73 (Defisit)	8	41.461.709.895	39.287.156.157	95	
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,40	4	4.657.590.371	4.334.891.432	93	
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	25,00 %	1	7.567.851.547	5.648.455.981	75	
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,64 (Sedang)	7	124.175.717.009	111.015.927.131	89	
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7582 (Tinggi)	21	1.601.035.762.579	1.184.659.054.047	74	
<b>TOTAL</b>						<b>158</b>	<b>6.583.329.971.972</b>	<b>4.961.656.893.759</b>	<b>75</b>





### 3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Kriteria penilaian dari analisis efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 99% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 99%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi sasaran dengan realisasi anggaran. Kriteria penilaian analisis efektifitas yaitu: Nilai positif berarti efektif (semakin tinggi nilainya berarti semakin efektif program dan kegiatan dalam mencapai sasaran), sedangkan nilai minus (negatif) berarti tidak efektif. Hasil Analisis efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran seperti tabel berikut :

Tabel 3.14  
Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program  
di Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFIISIENSI
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indek kerukunan umat beragama	114	80	34	Efisien
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	96	64	32	Efisien
		Opini BPK	100	60	40	Efisien



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	114	90	24	Efisien
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	130	81	49	Efisien
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	105	90	15	Efisien
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	111	78	33	Efisien
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	119	87	32	Efisien
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	141	92	49	Efisien
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	102	82	20	Efisien
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	348	93	255	Efisien
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	75	85	-10	Tidak Efisien
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	93	87	6	Efisien



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	103	82	21	Efisien
13.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	-118	85	-33	Tidak Efisien
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	100	88	12	Efisien
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	155	89	66	Efisien
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	121	95	26	Efisien
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113	93	20	Efisien
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	99	75	24	Efisien
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	112	89	23	Efisien
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	101	74	27	Efisien
<b>Total Kinerja</b>			<b>2,434</b>	<b>1.839</b>	<b>595</b>	<b>Efisien</b>



### 3.5. PRESTASI/PENGHARGAAN

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya yang sungguh-sungguh tersebut diapresiasi oleh pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait dalam bentuk penghargaan dan prestasi. Kabupaten Badung tahun 2023 mendapat 11 penghargaan/prestasi, secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 3.15  
Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	PERINGKAT I UKPBJ KABUPATEN PROAKTIF TERBAIK	PENGHARGAAN DIRAIH SETELAH UKPBJ PEMKAB BADUNG MENCAPAI TINGKAT KEMATANGAN PROAKTIF TAHUN 2022, KETERISIAN SDM JABATAN FUNGSIONAL PBJ MINIMAL 6% SKOR ITKP MELEBIHIN 70 DAN KEPALA DAERAH TIDAK SEDANG TERSANGKUT MASALAH HUKUM	24 MEI 2023	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
2	KABUPATEN BADUNG RAIH OPINI WTP	KEGIATAN DI DAERAH TENTANG APBD TERBUKA, TRANSPARAN DAN TAAT AZAS	9 MEI 2023	Pt. KEPALA BPK RI
3	PENGHARGAAN TROPHY ADIPURA SEBAGAI PERINGKAT KOTA BERSIH	KABUPATEN BADUNG TELAH MENGELOLA KEBERSIHAN WILAYAHNYA SECARA BERKELANJUTAN	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4	PENGHARGAAN PARITRANA AWARD PROVINSI BALI TAHUN 2022	KOMITMEN BUPATI BADUNG MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN FORMAL MAUPUN	9 MEI 2023	WAKIL GUBERNUR BALI





No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
		INFORMAL SECARA BERTAHAP		
5	PENGHARGAAN INDONESIA AWARDS 2023	PENGHARGAAN ATAS KINERJA BUPATI BADUNG DALAM MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT YANG ADA DILUAR KABUPATEN BADUNG ( BADUNG ANGELUS BUANA )	31 AGUSTUS 2023	INEWS MEDIA GROUP
6	TERBAIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMANTUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK ( PEKPPP ) TAHUN 2023	PERESMIAN BERSAMA MPP, PELUNCURAN inJIPPNAS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK	21 NOVEMBER 2023	MenPAN RB
7	PENYELENGGARAAN MALL PELAYANAN PUBLIK KATAGORI PRIMA	PERESMIAN BERSAMA MPP, PELUNCURAN inJIPPNAS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK	21 NOVEMBER 2023	MenPAN RB
8	PENGHARGAAN SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT		28 NOVEMBER 2023	KETUA UMUM LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT
9	PENGHARGAAN INOVASI MEMBANGUN NEGERI	KOMITMEN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DIBERIKAN OLEH TVONE DALAM ACARA YANG BERTAJUK INOVASI MEMBANGUN NEGERI	1 DESEMBER 2023	TVOne
10	PENGHARGAAN PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023	HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023, KABUPATEN BADUNG KEMBALI BERHASIL MEMPEROLEH PENGHARGAAN SEBAGAI	14 DESEMBER 2023	OMBUDSMAN RI



No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
		PERINGKAT 5 PREDIKAT KEPATUHAN KUALITAS TERTINGGAI TINGKAT KABUPATEN DENGAN NILAI 97,22 (ZONA HIJAU)		
11	PENGHARGAAN PRAJA ANINDITA MAHOTTAMA (TERBAIK I) PADA ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI BALI TAHUN 2023	RANGKAIAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 202	28 DESEMBER 2023	KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Sumber data : Bagian Prokopim Setda Kab. Badung Tahun 2023



# BAB IV PENUTUP

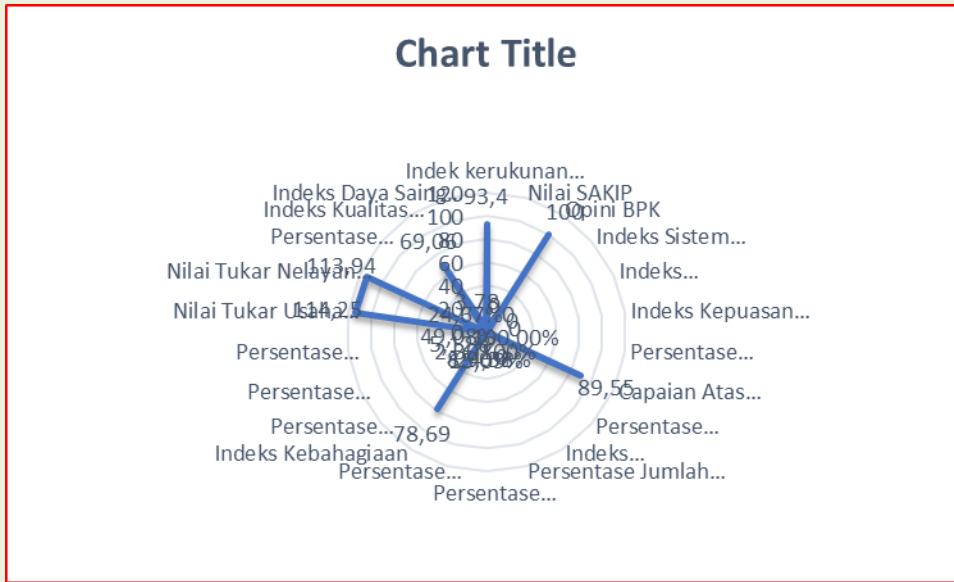
## 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan maka dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2023, seperti berikut :

1. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Badung terhadap capaian kinerja sasaran strategis sesuai RPJMD Semesta Berencana 2021-2026 beserta keberhasilan dan kegagalan.
2. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan, 19 sasaran dan 22 indikator kinerja utama (IKU).
3. Hasil capaian kinerja sasaran RPJMD terhadap 22 indikator yaitu sebesar 2,434 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111. Terdapat satu indikator dengan nilai minus diatas 100% yaitu persentase penduduk miskin sebesar -118%.
4. Hasil pengukuran indikator sasaran sebanyak 22 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :
  - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 17 indikator kinerja utama
  - b. Dibawah target (<100%) sebanyak 5 indikator kinerja utama
5. Hasil pengukuran indikator dengan nilai minus yaitu persentase penduduk miskin. Kondisi ini disebabkan Kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Badung meskipun di masa Pandemi Covid-19 tetap menjadi daya tarik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Gepeng dan PSK untuk melakukan aktivitasnya di Kabupaten Badung, hal ini mengakibatkan Kabupaten Badung belum bisa terbebas dari gelandangan, pengemis serta PSK dan belum maksimalnya pemulihan ekonomi akibat pandemi sehingga memerlukan berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.



6. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2023 sebesar Rp. 6.583.329.971.972,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.961.656.893.759 sehingga persentase penyerapan sebesar 75%.
7. Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2021-2026 untuk tahun 2023 seperti berikut :



## 4.2. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2023 sudah mencapai target bahkan sampai melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja, terdapat 5 indikator sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, maka Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target RPJMD semesta berencana 2021-2026 antara lain :

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator nilai SAKIP melalui :
  - a. Revisi pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP





- b. Melaksanakan pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah/pejabat yang membidangi SAKIP
        - c. Pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja masing-masing perangkat daerah
        - d. Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP Badung dengan baik untuk implementasi SAKIP dan pemberian Reward dan punishment bagi perangkat daerah.
        - e. Menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas Hasil Evaluasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB Bersama Tim SAKIP Kabupaten Badung, agar apa yang menjadi kekurangan dalam indikator nilai SAKIP data dioptimalkan ditahun berikutnya.
2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya jumlah wirausaha melalui :
  - a. Program kemitraan dengan perusahaan besar/toko modern untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk UMKM
  - b. Program Pameran Badung UMKM Week adalah bentuk dukungan pemerintah melalui pameran yang dilaksanakan di Mall /Pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk UMKM agar dikenal lebih luas baik ditingkat domestik maupun mancanegara
  - c. Sosialisasi Kemudahan perizinan usaha mikro, Program Pendampingan kepada UMKM dengan melibatkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk meningkatkan dan pengembangan UMKM
  - d. Melakukan konsolidasi internal dan koordinasi di Bidang pengembangan UMKM dengan para praktisi Koperasi seperti Dekopinda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.
3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB yaitu Pihak Dinas juga melakukan verifikasi biaya perkiraan revitalisasi pasar yang diajukan oleh pihak desa sehingga diperoleh angka yang lebih realistis, tujuannya adalah efisiensi penggunaan anggaran sebaik mungkin.
4. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
  - a. Memperluas akses kesejahteraan sosial
  - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial



- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial
  - d. Memberikan Bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai social safety net sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan.
5. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB melalui :
- a. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung
  - b. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
  - c. meningkatkan Pendapatan dari retribusi obyek wisata dan meningkatkan kualitas Industri Pariwisata

Mangupura, 7 Maret 2024

**Bupati Badung,**



**I NYOMAN GIRI PRASTA**

Lampiran I :

**Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	82
			(Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,00
			(BB)
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Opini BPK	WTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Baik)
			85,50
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	(Sangat Rendah)
			90.00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75.00
			(Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	71%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81.61
			(Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	7.00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	20.00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,54%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76.64
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	5,12%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31.67%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	94,73
			(Defisit)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100.40
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	25,00%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.64
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7582
			(Tinggi)



## Lampiran II :

## Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	82 (Sangat Tinggi)	93,4	114
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,00 (BB)	76,07 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	100
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,2 (Baik)	3,66 (Sangat Baik)	114
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	57,65 (Sangat Rendah)	74,84 (Sedang)	130
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,50 (Baik)	89,52 (Sangat Baik)	105
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	89,55	119
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	71%	100%	141
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,61 (Sangat Tinggi)	83,08 (Sangat Tinggi)	102
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	7,00%	24,38%	348
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	20,00%	15,09%	75
11.	Meningkatnya	13.	Persentase	%	9,54%	8,9%	93

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB				
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	76,64	78,69	103
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,95%	2,30%	-118
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	5,12%	5,12%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,67%	49,08%	155
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	94,73 (Defisit)	114,25	121
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,40	113,94	113
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	25,00%	24,67%	99
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,64 (Sedang)	69,06	112
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7582 (Tinggi )	3,7800	101
<b>Total Kinerja</b>							<b>2,434</b>
<b>Rata-rata Kinerja</b>							<b>111</b>

Lampiran III :  
**Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1	Indek kerukunan umat beragama	82 (Sangat Tinggi)	1	3,516,127,816	2,797,416,687	80
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	79,00 (BB)	5	7.631.895.606	4.866.311.807	64
		3.	Opini BPK	WTP	4	2.017.446.854.166	1.215.318.195.675	60
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2 (Baik)	8	253.029.474.518	227.801.941.958	90
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	57,65 (Sangat Rendah)	2	15.123.963.759	12.228.597.004	81
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 (Baik)	34	792.006.629.284	712.237.709.350	90
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00 %	7	9.800.637.994	7.684.934.396	78
6.	Terwujud	8.	Capaian	75,00	8	5.916.229.740	5.125.438.736	87

	nya Pemenuhan HAM		Atas Kepedulian HAM	(Peduli HAM)				
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	71%	11	296.879.469.532	272.649.751.952	92
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	81,61 (Sangat Tinggi)	7	1.306.941.238.785	1.072.522.867.545	82
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	7,00%	5	993.027.157	921.338.620	93
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	20,00 %	3	19.591.999.322	16.579.526.449	85
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,54%	5	1.658.659.223	1.448.083.779	87
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	76,64	6	11.861.971.751	9.761.853.098	82
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	1,95%	4	6.449.146.071	5.490.174.628	85
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	5,12%	4	12.510.803.879	11.019.737.573	88



15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,67 %	3	43.073.210.941	38.257.529.753	89
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	94,73 (Defisit)	8	41.461.709.895	39.287.156.157	95
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,40	4	4.657.590.371	4.334.891.432	93
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	25,00 %	1	7.567.851.547	5.648.455.981	75
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,64 (Sedang)	7	124.175.717.009	111.015.927.131	89
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7582 (Tinggi)	21	1.601.035.762.579	1.184.659.054.047	74
<b>TOTAL</b>					<b>158</b>	<b>6.583.329.971.972</b>	<b>4.961.656.893.759</b>	<b>75</b>

**Lampiran IV :  
Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten  
Badung Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)</b>	<b>REALISASI SASARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>EFEKTIVITAS</b>	<b>EFISIENSI</b>
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indek kerukunan umat beragama	114	80	34	Efisien
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	96	64	32	Efisien
		Opini BPK	100	60	40	Efisien
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	114	90	24	Efisien
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	130	81	49	Efisien
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	105	90	15	Efisien
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	111	78	33	Efisien
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	119	87	32	Efisien
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	141	92	49	Efisien
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	102	82	20	Efisien
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	348	93	255	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	75	85	-10	Tidak Efisien
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	93	87	6	Efisien
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	103	82	21	Efisien
13.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	-118	85	-33	Tidak Efisien
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	100	88	12	Efisien
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	155	89	66	Efisien
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	121	95	26	Efisien
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113	93	20	Efisien
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	99	75	24	Efisien

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)</b>	<b>REALISASI SASARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>EFEKTIVIT AS</b>	<b>EFISIENSI</b>
<b>18.</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	112	89	23	Efisien
<b>19.</b>	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	101	74	27	Efisien
	<b>Total Kinerja</b>		<b>2,434</b>	<b>1.839</b>	<b>595</b>	<b>Efisien</b>



**LAMPIRAN V :****PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 3 (tiga) dimensi yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Rumus formulasi penghitungan indeks kerukunan umat beragama sebagai berikut : $(Y) = (X1) + (X2) + (X3)$ Dimana : (Y) : Indeks kerukunan umat beragama (X1) : Pola Pendidikan Keluarga (X2) : Peran Kementerian Agama (X3) : Implementasi Kearifan Lokal Hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah 0-100.	Laporan Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau perubahannya. Penilaian Akuntabilitas kinerja terhadap 5 Aspek sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Capaian Kinerja	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP Oleh Kementerian PAN dan RB RI	Sekretariat Daerah Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Hasil Pengukuran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 0-100		
		Opini BPK	<p>Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, atau perubahannya.</p> <p>Hasil Pengukuran Opini BPK dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu WTP, WDP, <b>Opini Tidak Wajar</b> atau <i>adversed opinion</i>, dan <b>Pernyataan menolak memberikan opini</b> (<i>disclaimer of opinion</i>) atau <b>Tidak Memberikan Pendapat (TMP)</b>.</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian evaluasi SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau perubahannya. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE Oleh Kementerian PAN dan RB RI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>ND_j</math> adalah nilai indeks domain ke-<math>j</math>;</li> <li>• <math>BD_j</math> adalah nilai bobot domain ke-<math>j</math>.</li> </ul> <p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE adalah 0 – 5.</p>		
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau perubahannya.</p> <p>Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Rumus formulasi penghitungan nilai indeks profesionalitas pegawai ASN sebagai berikut:</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	Laporan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Keterangan :</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IPi = Indeks Profesionalisme k-i</p> <p>IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>Hasil Pengukuran indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 0-100</p>		
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penilaian survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan yaitu :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}</math> </div> <p>Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Nilai interval (NI): 1-4 atau Nilai Interval Konversi (NIK): 25-100.</p>	Laporan Hasil survei kepuasan masyarakat	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan Perda dan Perkada adalah :</p> $\frac{\sum \text{Penyelesaian Penegakan Perda dan perkada}}{\sum \text{Pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100\%$ <p>Hasil Pengukuran Persentase Penegakan Perda dan</p>	Laporan Pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Perkada adalah 0 – 100%		
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	<p>Penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau perubahannya. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya: a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.</p> <p>Rumus formulasi penghitungan penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">x = \sum x / n</math> </div> <p>x : Nilai Rata-rata  x : Jumlah capaian seluruh indikator  n : Jumlah kriteria</p> <p>Hasil Pengukuran penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah 0-100</p>	Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Layanan Hak-hak Dasar Manusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI	Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
7	Meningkatnya kreativitas	Persentase Pertumbuhan Seni	Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah :	Data Pertumbuhan	Dinas Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	serta pelestarian seni dan budaya	dan Budaya	$\frac{\sum \text{Kreativitas Seni}}{\sum \text{Kreativitas Seni}} \times 100 \%$ <p><i>yang Sudah Ada</i>            Hasil Pengukuran persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah 0 – 100%</p>	Seni dan Budaya	Kabupaten Badung
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus Formulasi penghitungan IPM sebagai berikut:</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>Menghitung Indeks Komponen Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.</p> <p>1. Dimensi Kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>2. Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Data Capaian Indikator IPM dari BPS	Dinas Kesehatan Kab. Badung. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>3. Dimensi Pengeluaran</p> $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$ <p>Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia adalah 0-100.</p>		
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	<p>Pengukuran terhadap kesehatan koperasi dilakukan melalui kegiatan hasil pengawasan koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan persentase koperasi sehat adalah :</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan :  Pn = Jumlah koperasi sehat  P1 = Jumlah koperasi yang dinilai  Hasil Pengukuran persentase jumlah koperasi sehat adalah 0-100 %.</p>	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha adalah :</p> $\frac{Pn - P1}{P1} \times 100\%$	Data Pertumbuhan jumlah wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Keterangan :</p> <p>Pn = Jumlah tahun ini Jumlah tahun Sebelumnya Hasil Pengukuran Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha adalah 0 – 100%.</p>		Perdagangan Kab. Badung
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	<p>Rumus perhitungan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Badung adalah :</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Pn = Kontribusi sektor perdagangan P1 = Kontribusi seluruh sektor</p> <p>Hasil pengukuran persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah 0 – 100%.</p>	Data Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB berasal dari BPS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	<p>Indeks kebahagiaan merupakan gambaran umum tingkat kepuasan penduduk terhadap keseluruhan domain kehidupan manusia yang dianggap esensial dengan memperhitungkan pula aspek perasaan dan makna hidup seseorang.</p> <p>Kriteria penilaian tingkat kebahagiaan terdiri dari tiga dimensi kehidupan, yaitu Dimensi Kepuasan Hidup (<i>Life Satisfaction</i>), Dimensi Perasaan (<i>Affect</i>), Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>).</p> <p>Aspek secara substansi merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial,</p>	Laporan Hasil Survei Indeks Kebahagiaan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Rumus Formulasi penghitungan indeks Kebahagiaan sebagai berikut :</p> $IKH = \frac{W_1 \times I_{KepuasanHidup} + W_2 \times I_{Perasaan} + W_3 \times I_{MaknaHidup}}{W_1 + W_2 + W_3}$ <p>W<sub>1</sub> = Penimbang dimensi kepuasan hidup W<sub>2</sub> = Penimbang dimensi perasaan W<sub>3</sub> = Penimbang dimensi makna hidup W<sub>1</sub>+W<sub>2</sub>+W<sub>3</sub>=1 I<sub>Kepuasan Hidup</sub> = Indeks Dimensi Kepuasan Hidup I<sub>Perasaan</sub> = IndeksDimensi Perasaan (Afeksi) I<sub>Makna Hidup</sub> = Indeks Dimensi Makna Hidup</p>		
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di suatu wilayah. Rumus Formulasi penghitungan persentase penduduk miskin sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Total Penduduk}} \times 100\%$ <p>Hasil Pengukuran Persentase penduduk miskin adalah 0 – 100%.</p>	Data Persentase Penduduk Miskin dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Sosial Kabupaten Badung
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	<p>Rumus Formulasi penghitungan Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Daya Tarik Pariwisata yang Berorientasi pertanian}}{\sum \text{Daya Tarik Wisata}} \times 100\%$ <p>Hasil pengukuran Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian</p>	Data pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			adalah 0 – 100%.		
15	Meningkatnya pengembangan agroindustry yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	<p>Rumusan Formulasi penghitungan Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam, seperti berikut :</p> $\frac{\sum \text{Usaha Agroindustry yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam}}{\sum \text{Usaha Agroindustry}}$ <p>Hasil pengukuran Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam adalah 0 – 100%.</p>	Data Pengembangan agroindustry Kabupaten Badung	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	<p>NTUP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. Rumus formulasi penghitungan NTUP melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan formula <i>Modified Laspeyres Index</i></p> $NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>NTUP=Nilai Tukar Usaha Petani  It=Indeks harga yang diterima petani  IbBPPBM=Indeks harga yang dibayar petani  Hasil pengukuran kisaran nilainya adalah <math>100 \leq NTP &lt; 100</math>.</p>	Data Nilai Tukar Usaha Petani dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	<p>NTN merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Pengukuran NTN berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-Kp/2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan atau perubahannya. Rumusan formulasi penghitungan Nilai Tukar Nelayan sebagai berikut :</p> $NTN = (It/Ib) \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>It = Jumlah total pendapatan dari hasil produk budidaya di kali bobot harga produk dibagi total harga dan produk pada tahun dasar dikali 100</p> <p>Ib = Jumlah total pengeluaran rumah tangga pembudidaya yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran biaya usaha budidaya di kali bobot harga konsumsi dibagi total harga dan konsumsi pada tahun dasar dikali 100</p> <p>Hasil Pengukuran kisaran nilainya adalah <math>100 \leq NTN \geq 100</math>.</p>	Data Nilai Tukar Nelayan dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Perikanan Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB														
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	<p>PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus formulasi penghitungan sebagai berikut:</p> $Y = C + G + GFCF + \Delta Invent + X - M$ <p>di mana:</p> <table> <tr> <td>Y (<i>Income</i>)</td> <td>= PDRB</td> </tr> <tr> <td>C (<i>Consumption</i>)</td> <td>= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPR</td> </tr> <tr> <td>G (<i>Government</i>)</td> <td>= Konsumsi pemerintah</td> </tr> <tr> <td>GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)</td> <td>= Pembentukan modal tetap bruto</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta</math> Invent</td> <td>= Perubahan inventori</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>= Ekspor</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>= Impor</td> </tr> </table> <p>Hasil pengukuran Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah 0 – 100%</p>	Y ( <i>Income</i> )	= PDRB	C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPR	G ( <i>Government</i> )	= Konsumsi pemerintah	GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan modal tetap bruto	$\Delta$ Invent	= Perubahan inventori	X	= Ekspor	M	= Impor	Data PDRB dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata Kab. Badung
Y ( <i>Income</i> )	= PDRB																		
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPR																		
G ( <i>Government</i> )	= Konsumsi pemerintah																		
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan modal tetap bruto																		
$\Delta$ Invent	= Perubahan inventori																		
X	= Ekspor																		
M	= Impor																		
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kriteria dalam penghitungan IKLH meliputi: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.</p> <p>Rumus formulasi penghitungan untuk IKLH adalah :</p> $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>IKA = Indeks Kualitas Air  IKU = Indeks Kualitas Udara  IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan</p>	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung														

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Hidup (IKLH) adalah 0-100		
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	<p>Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah terhadap 4 Aspek Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Faktor Penguat/ <i>Enabling Evironment</i></li> <li>2. Aspek Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i></li> <li>3. Aspek Pasar/ <i>Market</i></li> <li>4. Aspek Ekosistem Inovasi</li> </ol> <p>Rumus Formulasi penghitungan Indeks Daya Saing Daerah adalah :</p> $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n Aspek_i}{n}$ <p>Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah 0 - 5</p>	Hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Kemenristek/BRIN	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung